



KAJIAN PERSEPSI MASYARAKAT DAN ANALISIS PAD DAN DAU TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DENGAN BELANJA PEMERINTAH SEBAGAI PEMODARASI

TIM PENELITI

Ketua : Dr. Taufik Arbain, S.Sos., M.Si

Anggota :

- **Drs. Muhammad Saleh, MP**
- **Drs. Suriadi Sutiyo, M.Si**
- **Dr. Muhammad Noor, M.AP**
- **Dr. Muhammad Riyandi Firdaus, M.AP**

**PUSAT STUDI KEBIJAKAN PUBLIK
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TAHUN 2024**

LAPORAN HASIL
KAJIAN PERSEPSI MASYARAKAT DAN ANALISIS PAD DAN DAU
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN HSS
DENGAN BELANJA PEMERINTAH SEBAGAI PEMODARASI



TIM PENELITI

Ketua :

Dr. Taufik Arbain, M.Si

Anggota :

Drs. Muhammad Saleh, MP

Drs. Suriadi Sutiyo, M.Si

Dr. Muhammad Noor, MAP

Dr. Muhammad Riyandi Firdaus, MAP

KERJASAMA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

DENGAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Kajian Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan berjalan sesuai harapan. Kajian ini didedikasikan untuk menggali secara simultan pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi; Mengetahui secara parsial pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi; Mengetahui apakah belanja pemerintah sebagai variable *moderating* mempengaruhi hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi; serta Mengeksplorasi persepsi dan harapan publik terhadap indikator pertumbuhan ekonomi wilayah.

Mengapa Penting kajian ini dilakukan ? Tentu saja menjadi penting karena dengan kajian ini Menggambarkan pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) baik secara simultan maupun parsial kemudian mengetahui permasalahan dasar atas pertumbuhan ekonomi wilayah Hulu Sungai Selatan baik secara Parsial dan Simultan serta merekomendasikan kebijakan untuk masa yang akan datang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka evaluasi dan perumusan perencanaan pembangunan ekonomi dengan penggunaan PAD dan DAU melalui Belanja Pemerintah.

Permasalahan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam konteks PDRB masih didukung oleh sektor komoditas pertambangan (20,53%) yang rentan dengan resiko dapat merusak lingkungan. Padahal unggulan daerah HSS adalah sektor pertanian (20,48%) ini yang sangat perlu dikembangkan untuk pembangunan.

Tetapi untuk jangka panjang sangat perlu mengembangkan sektor-sektor lainnya supaya tidak terjadi kerentanan ekonomi. Kontribusi non pertambangan dan non pertanian masih rendah dan belum mampu jadi sektor andalan (58,99%) sektor lainnya ini sangat perlu dikembangkan untuk memberikan alternatif pekerjaan sebagai sumber pendapatan masyarakat.

Kajian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Mixed Methode) menggunakan Data Primer dan Data Sekunder yang dikumpulkan dengan Teknik survey, Observasi, Telaah Dokumen Kebijakan serta Indepth Interview sehingga kemudian dilakukan Analisis Mendalam terhadap data yang telah di kumpulkan untuk di reduksi, disajikan dan ditarik kesimpulan mengenai pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan belanja Pemerintah sebagai Variabel Pemoderasi. Survei Persepsi Publik dilakukan guna menyaring pandangan dan harapan publik terkait pertumbuhan ekonomi wilayah dengan sampel 800 responden yang tersebar di seluruh Kecamatan (sampling desa) dengan Teknik *multy stage random sampling* yang kemudian diperkuat dengan data kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi dan FGD.

Temuan kajian ini memberikan informasi positif bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan setidaknya diperoleh secara umum bahwa PAD Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada periode 2004- 2023 (selama 20 tahun) pertumbuhannya mengalami fluktuasi yang cukup tinggi dan dirasakan kepuasannya oleh seluruh masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas kerjasama dan kepercayaannya sehingga laporan ini dapat disusun tepat waktu sebagaimana yang diharapkan. Semoga hasil kajian ini memberikan manfaat dan menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan di masa akan datang. Tak lupa juga penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang membantu fasilitasi proses kajian hingga selesai.

Banjarmasin, 14 Oktober 2024

Tim Peneliti
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Lambung Mangkurat

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR	i
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Tujuan Kajian	6
1.3 Output Kajian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	8
2.2 Pendapatan Asli Daerah	11
2.3 Dana Alokasi Umum.....	13
2.4 Belanja Daerah.....	14
2.5 Kesejahteraan.....	15
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan dan Lokasi	19
3.2 Pengumpulan Data.....	22
BAB IV GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH	
4.1 Letak Geografis	24
4.2 Kondisi Demografi	36
BAB V ANALISIS HASIL KAJIAN	
5.1 Analisis PAD dan DAU Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dengan Belanja Pemerintah Sebagai Pemodaras.....	43

5.2 Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan	60
---	----

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	98
6.2 Rekomendasi	102

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Peta Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan	25
Gambar 4.2	Grafik Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan	37
Gambar 4.3	Grafik Laju Pertumbuhannya di Kab. Hulu Sungai Selatan, Tahun 2020-2023	37
Gambar 4.4	Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023	38
Gambar 4.5	Diagram Ketenagakerjaan Tahun 2023	40
Gambar 4.6	Grafik Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Ditamatkan Tahun 2023	41
Gambar 4.7	Grafik Persentase Penduduk Miskin Tahun 2015-2023	42
Gambar 5.1	Grafik Uji Normalitas	49
Gambar 5.2	Grafik Sebaran Sampel Berdasarkan Kecamatan	60
Gambar 5.3	Grafik Responden Menurut Jenis Kelamin	62
Gambar 5.4	Diagram Responden Menurut Tingkat Pendidikan	62
Gambar 5.6	Grafik Responden Menurut Jenis Pekerjaan.....	63
Gambar 5.7	Grafik Peningkatan Perekonomian Masyarakat HSS ..	65
Gambar 5.8	Grafik Peningkatan Perekonomian Masyarakat HSS Menurut Kecamatan.....	66
Gambar 5.9	Grafik Perubahan Perekonomian Masyarakat HSS	67
Gambar 5.10	Grafik Perubahan Perekonomian Masyarakat HSS Menurut Kecamatan	69
Gambar 5.11	Grafik Pertumbuhan Kesempatan Kerja Kabupaten HSS	70

Gambar 5.12	Grafik Pertumbuhan Kesempatan Kerja Kabupaten HSS Menurut Kecamatan.....	71
Gambar 5.13	Grafik Peningkatan Kemudahan Kabupaten HSS	72
Gambar 5.14	Grafik Peningkatan Kemudahan Kabupaten HSS Menurut Kecamatan.....	74
Gambar 5.15	Grafik PDRB Kabupaten HSS	75
Gambar 5.16	Grafik PDRB Kabupaten HSS Menurut Kecamatan...	77
Gambar 5.17	Grafik Peningkatan Pemanfaatan SDA Kabupaten HSS	78
Gambar 5.18	Grafik Peningkatan Pemanfaatan SDA Kabupaten HSS Menurut Kecamatan.....	79
Gambar 5.19	Grafik Peningkatan Mutu Pendidikan Kabupaten HSS	80
Gambar 5.20	Grafik Peningkatan Mutu Pendidikan Kabupaten HSS Menurut Kecamatan	82
Gambar 5.21	Grafik Pemanfaatan Teknologi Kabupaten HSS	83
Gambar 5.22	Grafik Pemanfaatan Teknologi Kabupaten HSS Menurut Kecamatan	84
Gambar 5.23	Grafik Sistem Sosial Pemerintah Kabupaten HSS.....	86
Gambar 5.24	Grafik Sistem Sosial Pemerintah Kabupaten HSS Menurut Kecamatan	87
Gambar 5.25	Grafik Peningkatan Aksesibilitas Pasar Kabupaten HSS	88
Gambar 5.26	Grafik Peningkatan Aksesibilitas Pasar Kabupaten HSS Menurut Kecamatan.....	90
Gambar 5.27	Grafik Dampak Pertumbuhan/Perbaikan Ekonomi Pada Pengurangan Kemiskinan Kabupaten HSS.....	91
Gambar 5.28	Grafik Dampak Pertumbuhan/Perbaikan Ekonomi Pada Pengurangan Kemiskinan Kabupaten HSS Menurut Kecamatan.....	92

Gambar 5.29	Grafik Pemerataan Pembagian Pendapatan Kabupaten HSS	93
Gambar 5.30	Grafik Pemerataan Pembagian Pendapatan Kabupaten HSS Menurut Kecamatan.....	95
Gambar 5.31	Grafik Harapan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten HSS	96

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan.....	25
Tabel 5.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan PAD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2004-2023.....	44
Tabel 5.2	Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pertumbuhan DAU Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2004-2023.....	46
Tabel 5.3	Belanja Daerah, Pertumbuhan Belanja Daerah dan Petumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2004-2023	48
Tabel 5.4	Distribusi Nilai Tabel Durbin Watson Level of Significance $\alpha = 0,05$	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan sesuatu yang dinamis dengan orientasi dan kegiatan tanpa akhir terlebih ketika bertaut dengan suatu perubahan sosial dan budaya. Cakupan dari proses pembangunan adalah sistem sosial publik, pendidikan, kualitas pelayanan, teknologi serta komitmen politik. Portes (2006) menyebut pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi dan kewenangan Pemerintah Daerah diperlukan adanya kemampuan keuangan daerah yang mampuni, potensi kemampuan keuangan suatu daerah dapat terus meningkat dengan memaksimalkan pendapatan dan mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya. Menurut Isyandi dan Trihatmoko (2022) mengatakan bahwa hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia menghadapi masalah yang sama, yaitu terbatasnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerahnya karena kurangnya dana dan sumber pendanaan di daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki daerah merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk terus meningkatkan pertumbuhan suatu daerah, khususnya sebagai upaya

untuk meningkatkan keuangan daerah untuk membiayai Pemerintahan dan pembangunan daerah yang disalurkan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain PAD, Dana Bagi Hasil yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) juga merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan oleh Pemerintah pusat kepada setiap otonomi daerah di Indonesia sebagai dana untuk pembangunan daerah setiap tahunnya. DAU yang diterima setiap daerah tidaklah sama, hal ini dikarenakan perhitungan pengalokasikan dana didasarkan pada potensi dan kebutuhan daerah masing-masing daerah. Pemerintah daerah diharapkan bisa memaksimalkan alokasi PAD yang diterima untuk kebutuhan belanja daerah dengan adanya transfer dari pusat berupa DAU ini (Suryani & Pariani, 2018). Belanja pemerintah daerah akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang selanjutnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, hal tersebut dilakukan untuk melihat hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh suatu negara atau suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Dengan demikian, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila pendapatan riil masyarakat tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu,

pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan sejauh mana produktifitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu (Boediono, 2013). Pertumbuhan ekonomi merupakan proses dari tahapan kemajuan ekonomi selanjutnya, yaitu dengan adanya kesempatan kerja dan produktifitas serta distribusi pendapatan. Untuk mengetahui sejauh mana pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah adalah dengan mengetahui tingkat produk domestik.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi tolok ukur pertumbuhan ekonomi disuatu daerah. Kenaikan atau penurunan PDRB mengindikasikan terjadinya kenaikan atau penurunan dalam proses produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah. Konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal dan nilai ekspor neto adalah komponen yang mempengaruhi besaran PDRB. Sehingga jika terjadi kenaikan PDRB artinya terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi daerah. Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah menggambarkan tingkat perubahan kesejahteraan ekonomi. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka kesejahteraan juga ikut meningkat, begitu juga sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi menurun atau bahkan negatif maka kesejahteraan akan menurun. Selain itu tingkat pertumbuhan ekonomi dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk kebijakan dan perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih baik.

Belanja Daerah adalah seluruh pengeluaran daerah yang digunakan untuk membiayai belanja operasional, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah menjelaskan “Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.”. Sedangkan Belanja Modal atau bisa dikatakan sebagai pengeluaran modal merupakan alokasi dana daerah yang direncanakan untuk mendapatkan aset tetap dengan masa manfaat sekonomi lebih dari satu periode.

Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menegaskan besaran persentase belanja untuk daerah, dimana dalam hal belanja pegawai daerah wajib mengalokasikan maksimum 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (transfer ke daerah). Sedangkan besaran persentase untuk belanja infrastruktur yaitu minimum 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa.

Memaksimalkan sumber daya yang dimiliki daerah bisa membantu meningkatkan PAD yang dapat digunakan untuk kegiatan infrastruktur maupun sarana dan prasarana daerah melalui alokasi Belanja Modal Daerah. Selain memaksimalkan PAD, dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, pemerintah pusat juga memberikan dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DBH dan DAU. Pemberian DAU ini dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan dan pembangunan antar daerah.

Dalam suatu daerah, pembangunan sejatinya harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, berkelanjutan dan akuntabel demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam implementasi pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tentu tidak sedikit masalah yang dihadapi. Permasalahan pembangunan di daerah sejatinya menggambarkan kinerja daerah dan kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan.

Pertama permasalahan dibidang ekonomi. PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih sangat didukung oleh sektor komoditas pertambangan dan pertanian yang rentan dengan resiko. PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2023 masih sangat didukung oleh sektor komoditas pertambangan mencapai 20,53% dan sektor pertanian mencapai 20,48%, sedangkan kontribusi sektor non pertambangan dan non pertanian terhadap PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai 58,99%. Rendahnya kontribusi sektor non pertambangan dan non pertanian disebabkan karena sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor konstruksi, sektor perdagangan dan sektor- sektor lainnya kontribusinya masih kecil dan belum mampu menjadi sektor andalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kedua, permasalahan bidang pengembangan sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana hal ini menjelaskan tentang bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh **pendapatan per kapita**, kesehatan dan

pendidikan. IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2023 menduduki peringkat ke- 7(tujuh) dengan nilai IPM 73,21 dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Pendapatan per kapita merupakan salah satu faktor yang mendukung/menghambat perkembangan IPM tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tinggi akan mempercepat meningkatkan pendapatan per kapita.

Permasalahan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan apakah dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan IPM, kemudian dengan adanya pertumbuhan ekonomi daerah ini apakah masyarakat Hulu Sungai Selatan merasa lebih sejahtera, sangat perlu dikaji.

1.2 Tujuan Kajian

Dari latar belakang yang sudah diuraikan maka kajian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui secara simultan pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- b. Mengetahui secara parsial pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- c. Mengetahui apakah Belanja Pemerintah sebagai variabel *moderating* mempengaruhi hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana

Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- d. Mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi daerah ini dapat menjadikan masyarakat Hulu Sungai Selatan merasa lebih sejahtera.

1.3 Output Kajian

Dari 4 (empat) tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini, maka output pada kajian ini adalah:

- a. Tersusunnya Laporan Pengaruh PAD dan DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Belanja Pemerintah sebagai variabel Pemoderasi.
- b. Dapat diketahuinya apakah pertumbuhan ekonomi daerah ini dapat menjadikan masyarakat Hulu Sungai Selatan merasa lebih sejahtera.
- c. Terkonstruksinya rekomendasi-rekomendasi dari hasil kajian dalam rangka evaluasi dan perumusan perencanaan pembangunan ekonomi dengan penggunaan PAD dan DAU melalui Belanja Pemerintah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan di masa akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut para ahli ekonomi Klasik dikutip dalam buku Makroekonomi yang ditulis oleh Sukirno (2015), menyatakan ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Namun, ahli-ahli ekonomi Klasik berfokus pada pengaruh penambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi Klasik dapat dilihat ketika produk marginal meningkat daripada pendapatan perkapita yang disebabkan oleh kekurangan produk. Sebaliknya, jika jumlah penduduk meningkat maka produk hasil marginal mengalami penurunan, sehingga pendapatan nasional dan pendapatan per kapita pertumbuhan semakin lambat. Teori Klasik ini dikenal dengan teori penduduk yang optimal.

Teori Harrod-Domar (dikutip dalam Arsyad 2015) bahwa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh (*stady growth*) dalam jangka panjang. Analisis Harrod-Domar menggunakan permisalan sebagai berikut: 1). barang modal telah mencapai kapasitas penuh, 2). tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional, 3). rasio modal-produksi (*capital-output ratio*)

tetap nilainya dan 4). perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Dalam analisisnya menunjukkan bahwa walaupun pada suatu tahun tertentu barang-barang modal sudah mencapai kapasitas penuh, pengeluaran agregat dalam tahun tertentu akan menyebabkan kapasitas barang modal menjadi semakin tinggi pada tahun berikutnya. Artinya investasi yang berlaku dalam tahun tertentu akan menambah kapasitas barang modal untuk memproduksi barang dan jasa pada tahun berikutnya (Arsyad, 2015).

Selanjutnya teori pertumbuhan neoklasik ini telah dikembangkan sejak tahun 1950an. Teori ini mengacu pada kerangka analisis dengan Belanja Pemerintah Sebagai Pemoderasi pertumbuhan ekonomi yang mengikuti perspektif ilmu ekonomi klasik. Menurut teori Solow-Swan, pertumbuhan ekonomi bergantung pada ketersediaan faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan teoritis ini didasarkan pada asumsi teori ekonomi klasik bahwa perekonomian berada pada tingkat kesempatan kerja penuh (*full employment*) dan faktor-faktor produksi dimanfaatkan sepenuhnya. Artinya, perekonomian terus berkembang, semuanya bergantung pada pertumbuhan penduduk, akumulasi modal dan kemajuan teknologi. Teori ini juga menyatakan bahwa tingkat produksi modal dapat berubah. Kombinasi modal dan tenaga kerja yang berbeda dapat digunakan untuk menghasilkan sejumlah output tertentu. Semakin banyak modal yang digunakan maka semakin sedikit tenaga kerja yang dibutuhkan dan sebaliknya. Hal ini memberikan kebebasan tanpa batas bagi perekonomian

dalam menentukan kombinasi modal dan tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan tingkat output tertentu (dikutip dalam Arsyad, 2015).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001 yang diawali dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sesudah mengalami berbagai revisi hingga menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Terakhir telah diubah melalui UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Davoody dan Zou (1998) menemukan dampak desentralisasi fiskal yang berbeda antara negara sedang berkembang dan negara maju. Pada negara maju desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada negara berkembang desentralisasi fiskal berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara Ganaie et al. (2018) menganalisis hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi dalam kasus India dan hasil yang terungkap bahwa desentralisasi belanja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik negara. Di sisi lain, desentralisasi penerimaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap produk dalam negeri.

Dalam pelaksanaan desentralisasi dikenal adanya transfer dari pemerintah pusat ke daerah melalui pemberian dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan

Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan sumber-sumber penerimaan daerah di dalam melaksanakan desentralisasi berasal dari pembiayaan daerah dan pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Masih minimnya peningkatan PAD di setiap daerah kabupatendaerah tertinggal bila dibandingkan dengan jumlah dana perimbangan, menunjukkan lebih banyak bentuk sumbangan dan bantuan pemerintah pusat dalam menunjang pembiayaan pembangunan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi/PDRB riil.

2.2. Pendapatan Asli Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disingkat APBD merupakan suatu rencana kerja pelaksanaan anggaran keuangan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu satu periode atau satu tahun. Dalam strukturnya APBD terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan, kemudian setiap kategorinya terbagi lagi menjadi beberapa jenis sumber penerimaan maupun pengeluarannya. Dalam APBD Pendapatan Daerah terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk jenis Belanja dalam APBD terbagi menjadi Belanja Operasional, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga, sedangkan Pembiayaan terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Menurut Suastika & Yasa (2017) PAD atau pendapatan asli daerah adalah salah satu indikator kemandirian pada otonomi daerah dalam

menggali potensi untuk meningkatkan sumber sumber penerimaannya. Dimana semakin besar pendapatan asli daerah maka semakin mandiri suatu daerah dalam mengambil keputusan dan kebijakan pembangunan. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang bersumber dari wilayah itu sendiri, semakin tinggi PAD suatu daerah maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki untuk melakukan pembangunan daerahnya. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari 4 (empat) sumber yaitu, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terdiri dari PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB. Retribusi Daerah menurut ketentuan umum pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam buku Suparmoko (2002) retribusi dikelompokkan kedalam 3 (tiga) jenis, yaitu retribusi yang dikenakan pada jasa umum, dikenakan pada jasa usaha, dan pada perizinan tertentu.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan salah satu penerimaan daerah yang bersumber atas hasil penyertaan modal daerah. Ada 3 (tiga) jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu: (a). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, (b). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Pemerintah/BUMN dan (c). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Lain-lain PAD yang Sah Jenis-jenis penerimaan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan diantaranya adalah: (1). Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan (2). Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan (3). Hasil kerja sama daerah (4). Jasa Giro (5). Pendapatan bunga (6). Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah (7). Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain (8). Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan (9). Pendapatan denda pajak daerah (10). Pendapatan denda retribusi daerah (11). Pendapatan dari pengembalian (12). Pendapatan BLUD (13). Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) (14). Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.

2.3. Dana Alokasi Umum

Menurut Undang- Undang No.1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi

ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah. Selanjutnya menurut Sumangkut, Kindangen, Walewangko (2016) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana transfer pemerintahan yang terikat dengan pengeluaran tertentu dengan tujuan menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah maupun pusat dengan daerah, oleh karena itu penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) setiap daerah tidak akan sama besarnya.

Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk menutup celah fiskal yang disebabkan karena kebutuhan suatu daerah lebih besar dari potensi penerimaan daerah. Besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) menjadi penentu besaran Dana Alokasi Umum dari suatu daerah, celah fiskal (*fiscal gap*) merupakan selisih dari perhitungan *fiscal need* dengan *fiscal capacity* (Ferdiansyah, Deviyanti, & Pattisahusiwa, 2018). Dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan bentuk penerimaan pemerintah daerah yang bersumber dari APBN/Pemerintah Pusat dengan tujuan untuk meratakan kemandirian keuangan daerah dan menutup celah fiskal dalam rangka menjalankan desentralisasi fiskal.

2.4. Belanja Daerah

Menurut Undang- Undang No.1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada pasal 140 Undang- Undang No.1 Tahun 2022, Belanja Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan: a.

kerangka pengeluaran jangka menengah Daerah; b. penganggaran terpadu; dan c. penganggaran berbasis kinerja. Selanjutnya pada pasal 141 ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Gonschorek dan Schulze (2018) menyatakan bahwa sistem transfer fiskal antar Pemerintah di Indonesia telah bergerak ke arah yang benar secara keseluruhan. Penelitian yang dilakukan oleh Siliverstovs dan Thiessen (2015) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi regional di 22 provinsi wilayah Perancis dipengaruhi secara positif oleh sistem pemerataan fiskal. Penelitian Raza dan Hafsa (2016) melakukan studi desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi provinsi dan efek spoiler di Pakistan. Hasil pengujian menyatakan bahwa desentralisasi pendapatan positif, sementara desentralisasi pengeluaran (belanja) memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Pakistan.

2.5. Kesejahteraan

Kesejahteraan ini dibatasi hanya yang berhubungan dengan Teori Indikator Pertumbuhan Ekonomi Wilayah menurut Rahardjo Adisasmita, 2014 ; Laurensius Julian, 2015, yaitu: (1). Distribusi Pendapatan, (2). Perubahan Struktur Perekonomian, (3). Pertumbuhan Kesempatan Kerja, (4). Tingkat dan Penyebaran Kemudahan memenuhi kebutuhan hidup (seperti pemenuhan sandang, pangan, papan, pelayanan kesehatan,

pendidikan, kesempatan melakukan ibadah), (5). Produk Domestik Regional Bruto, (6). Sumber Daya Alam, (7). Mutu Pendidikan, (8). Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (9). Sistem Sosial dan (10). Pasar.

Ketimpangan pendapatan merujuk pada perbedaan dalam distribusi pendapatan antar individu, rumah tangga, atau kelompok dalam suatu populasi atau negara. Terdapat dua konsep mengenai pengukuran ketimpangan pendapatan menurut Sukirno (2015) yaitu ketimpangan absolut yang merupakan sebuah konsep pengguna parameter dengan suatu nilai multak untuk mengukur sebuah ketimpangan. Kemudian, ada ketimpangan relatif, yaitu konsep untuk membandingkan besarnya pendapatan yang didapat oleh seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dengan besarnya total pendapatan yang didapat oleh masyarakat secara keseluruhan untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Semakin tidak meratanya pola distribusi pendapatan, maka akan semakin tinggi pula laju pertumbuhan ekonomi sebab orang-orang yang memiliki penghasilan lebih tinggi memiliki rasio tabungan yang lebih tinggi dari pada orang yang berpenghasilan rendah, hal itu akan menyebabkan terjadinya peningkatan *aggregate saving rate* yang diikuti oleh peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2006).

Simon Kuznets (1955) dalam bukunya yang berjudul "*Economic Growth and Income Inequality*" mengatakan bahwa ketimpangan pendapatan ditahap awal cenderung mengalami kenaikan karena adanya perekonomian yang mengalami penurunan yang cukup besar dalam pendistribusian pendapatan, Adapun setelah tahap pembangunan

berikutnya ketimpangan pendapatan berkemungkinan mengalami penurunan karena distribusi pendapatan sudah lebih merata.

Koefisien Gini atau yang biasa disebut indeks gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang dikembangkan oleh seorang ilmuwan sosial yang berfokus pada bidang statistik bernama Corrado Gini pada tahun 1912. Indeks gini dijadikan sebagai alat untuk menggambarkan dan mengukur distribusi pendapatan di dalam suatu masyarakat (Lembaga Independen Oxfam Indonesia & International NGO Forum on Indonesia Develoment, 2017). Konsep ini terkait dengan kurva lorenz yang memvisualisasikan distribusi pendapatan nasional dengan cara yang jelas.

Kurva Lorenz adalah representasi grafis dari distribusi kumulatif pendapatan atau kekayaan di antara anggota suatu populasi atau kelompok. Kurva ini digunakan untuk mengilustrasikan sejauh mana ketimpangan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan yang ada dalam suatu masyarakat atau ekonomi. Kurva Lorenz membantu dalam visualisasi dan analisis mengenai bagaimana pendapatan atau kekayaan dapat terbagi di antara berbagai kelompok populasi. Kurva Lorenz merupakan kurva yang biasa digunakan sebagai patokan dalam menentukan merata atau setidaknya distribusi pendapatan.

Para peneliti dan pembuat kebijakan menggunakan metode gini untuk mengukur dan membandingkan tingkat ketimpangan pendapatan antara negara, wilayah atau kelompok penduduk yang berbeda. Penemuan gini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang ketimpangan sosial dan ekonomi. Indeks gini menjadi alat umum yang digunakan dalam analisis kebijakan untuk

memantau dan mengukur ketimpangan pendapatan serta mengevaluasi efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan.

Distribusi pendapatan ini akan berpengaruh pada variabel- variabel lainnya seperti perubahan struktur ekonomi, pertumbuhan kesempatan kerja, tingkat dan penyebaran kemudahan memenuhi kebutuhan hidup, produk domestik regional bruto (PDRB), pengelolaan sumber daya alam, mutu pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem sosial yang ada di masyarakat dan sistem pasar.

BAB III METODE KAJIAN

3.1 Pendekatan dan Lokasi

Kajian ini menggunakan pendekatan *Mixed Methode* dimana kebutuhan penelitian saat ini tidak sekadar satu pendekatan saja dalam rangka mendapatkan hasil dan informasi mendalam, terlebih penelitian ini juga ada menyangkut persepsi publik. Untuk itu diperlukan kombinasi metode, yaitu:

- 1) Pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan masalah yang terjadi pada saat penelitian. Pada pendekatan kuantitatif ini menggunakan pengujian secara statistik. Analisis regresi linear berganda merupakan teknik analisis yang menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Regresi linear berganda dapat digunakan apabila penelitian bertujuan untuk meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen dengan syarat jumlah variabel independent atau variabel bebas berjumlah 2 (dua) atau lebih (Sugiyono & Susanto, 2017) Hubungan antar variabel dalam penelitian ini digambarkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Pertumbuhan Ekonomi

α = Konstanta

β_1, β_2 , = Slope atau koefisien regresi $X_1 = \text{PAD}$, dan $X_2 = \text{DAU}$

e = Error

Moderated Regression Analysis (MRA)

Metode analisis regresi moderasi menurut Sugiyono (2017:39) moderasi adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen. Dalam penelitian ini digunakan untuk menguji hubungan variabel belanja pemerintah dalam memoderasi variabel independen terhadap variabel dependen, yang dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut:

Model MRA 1

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 Z + \beta_3 X_1 * Z + e$$

Model MRA 2

$$Y = \alpha + \beta_2 X_2 + \beta_2 Z + \beta_3 X_2 * Z + e$$

(sumber: Liana, 2009)

Keterangan:

Y = Belanja Modal

$\alpha = \text{Konstanta}$ $\beta_1 - \beta_3 = \text{Slope atau koefisien regresi}$ $X_1 = \text{PAD}$, $X_2 = \text{DAU}$, $Z = \text{Belanja Pemerintah}$, $\beta_3 X_1 * Z = \text{Interaksi antara PAD terhadap Belanja Pemerintah}$ $\beta_3 X_2 * Z = \text{Interaksi antara DAU terhadap Belanja Pemerintah}$.

e = Error

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dapat dilakukan dengan uji koefisien determinasi, uji statistik F dan uji statistik t dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Uji koefisien determinasi

Uji koefisien determinasi atau adjusted R square digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase kemampuan variabel independen secara simultan dapat mempengaruhi variabel dependen dengan rentan nilai persentase 0 sampai dengan 100.

b. Uji F (Uji Simultan)

Uji simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, dengan syarat hasil pengujian yaitu jika nilai F hitung $>$ F tabel dan nilai sig. $<$ 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji t (uji parsial)

Uji parsial dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel independen secara terpisah terhadap variabel dependen, dengan syarat hasil pengujian yaitu jika nilai t hitung $>$ t tabel dan nilai sig. $<$ 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

d. Uji Interaksi (MRA)

Uji interaksi digunakan untuk melihat apakah variabel moderasi berperan dalam mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

2) Pendekatan kualitatif yang akan digali secara mendalam dengan FGD, Wawancara mendalam dan observasi serta olah data sekunder. Kajian Persepsi Masyarakat dan Analisis PAD dan DAU Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dengan Belanja Pemerintah Sebagai Pemoderasi dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran secara kongkrit. Apakah capaian pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang cukup tinggi sudah sesuai dengan kondisi yang diterima dan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian apakah harapan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap Pemerintahan Daerah serta permasalahan apa yang dirasakan adalah beberapa point pertanyaan yang perlu dijawab melalui kajian ini

3.2 Pengumpulan Data

3.2.1 Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan catatan maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2003-2023.

3.2.2 Data primer

Pada pendekatan survey akan dilakukan dengan *multy stake random sampling*, yang mana sampel tersebar di seluruh kecamatan dan sampling desa hingga RT se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan jumlah kisaran sampel mencapai 800 sampel. Pada pendekatan kualitatif dilakukan FGD pada sampel kecamatan minimal 4 kecamatan, dengan melibatkan representasi desa, dan didukung dengan observasi, dan wawancara mendalam agar mendapatkan informasi yang komprehensif terkait penilaian publik atas hasil dari penggunaan dana dari PAD dan DAU melalui Belanja Daerah apakah bisa mensejahterakan masyarakat Hulu Sungai Selatan. Temuan hasil akan dianalisis dengan Analisis statistik, frekuensi, tabulasi, AHP, analisis narrative eksplanasi dan didialektikan dengan pola triangulasi data dengan sajian tabel, grafik dan narasi serta matrik.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH

4.1 Letak Geografis

Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah salah satu Kabupaten dari 13 (tiga belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak 135 Km sebelah utara ibu kota Propinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki banyak keanekaragaman hayati yang melimpah. Tak ketinggalan pula kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat yang secara turun temurun dilestarikan dan dikembangkan sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk berkunjung ke daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini merupakan potensi pengembangan daerah yang harus digali sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki luas wilayah 1.804,94 km² terbagi menjadi 11 wilayah administrasi Kecamatan, 144 Desa dan 4 Kelurahan dengan pusat pemerintahan sekaligus ibukotanya yakni Kota Kandangan. Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut:

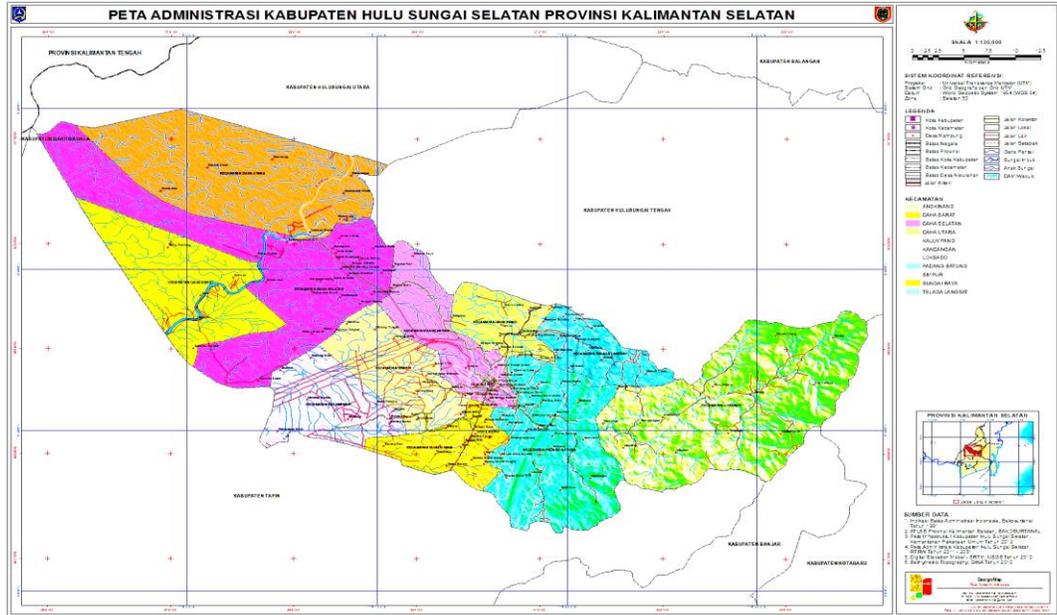
Sebelah utara : Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sebelah timur : Kabupaten Banjar dan Kabupaten Kotabaru.

Sebelah selatan : Kabupaten Tapin.

Sebelah barat : Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin

Batas-Batas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2023

Untuk luas wilayah menurut kecamatan dan jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat diketahui dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Km) ²	Desa/Kelurahan
1	Padang Batung	203,93	17 Desa
2	Loksado	338,89	11 Desa
3	Telaga Langsat	58,08	11 Desa
4	Angkinang	58,40	11 Desa
5	Kandangan	106,71	14 Desa 4 Kelurahan
6	Sungai Raya	80,96	18 Desa
7	Simpur	82,35	11 Desa
8	Kalumpang	135,07	9 Desa

9	Daha Selatan	322,82	16 Desa
10	Daha Barat	149,62	7 Desa
11	Daha Utara	268,11	19 Desa
Jumlah		1.804,94	148 Desa dan 4 Kelurahan

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2023

Secara astronomis Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak diantara 02°29'59"LS – 02°56'10"LS dan 114°51'19"BT – 115°36'19"BT. Dan Kota Kandangan terletak pada 2°47'LS – 115°40'BT yang dilewati oleh Sungai Amandit, anak sungai dari Sungai Barito. Posisi Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sangat strategis karena pada bagian Timur terletak pada jalur arteri primer Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur sedangkan bagian Barat jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, daerah berbukit dengan lereng terjal (antara 25 sampai lebih dari 40%) mencapai luas hampir 12% dari total keseluruhan wilayah. Daerah perbukitan tersebar di 4 (empat) kecamatan yaitu Padang Batung, Telaga Langsat, sebagian Sungai Raya dan yang paling luas terdapat di Kecamatan Loksado. Daerah dengan lereng terjal ini merupakan bagian dari jalur Pegunungan Meratus yang sebagian difungsikan sebagai kawasan lindung.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki sistem hidrologi yang terdiri dari sungai, danau dan rawa. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan umumnya berpangkal di Pegunungan Meratus dan berakhir di Laut Jawa setelah bergabung

dengan Sungai Barito. Ditinjau dari kondisi hidrologi Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki 25 Daerah Aliran Sungai (DAS).

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki hutan yang cukup luas meskipun setiap tahun mengalami penurunan karena adanya berbagai eksploitasi lahan, industrialisasi wilayah, hingga pembukaan lahan baru untuk pemukiman. Luas wilayah hutan saat ini mencapai 55.382,33 Ha dengan persentase sebesar 30,68% disusul oleh Padang (Semak, Alang, Rumput) dengan luas 53.829,44 Ha atau 29,82%.

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Berikut kawasan budidaya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berikut ini:

- 1) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap, meliputi Kecamatan Loksado, Kecamatan Padang Batung, Kecamatan Sungai Raya, dan Kecamatan Telaga Langsat;
- 2) Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi, meliputi Kecamatan Daha Barat, Kecamatan Daha Selatan, dan Kecamatan Daha Utara;
- 3) Kawasan peruntukan pertanian, terdiri atas kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan basah yang meliputi Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Simpur, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Telaga Langsat, Kecamatan Daha Utara, Kecamatan Padang Batung, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Angkinang, dan Kecamatan Daha Selatan;

- 4) Kawasan peruntukan pertanian, terdiri atas kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan kering/tegalan yang meliputi Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Telaga Langsat, Kecamatan Padang Batung, dan Kecamatan Loksado;
- 5) Kawasan peruntukan pertanian, terdiri atas kawasan peruntukan pertanian Hortikultura jenis komoditas buah-buahan berupa semangka yang meliputi Kecamatan Telaga Langsat, Kecamatan Padang Batung, Kecamatan Daha Barat, Kecamatan Daha Selatan, dan Kecamatan Daha Utara;
- 6) Kawasan peruntukan pertanian, terdiri atas kawasan peruntukan pertanian hortikultura jenis komoditas sayur-sayuran yang meliputi Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Telaga Langsat, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Angkinang, dan Kecamatan Padang Batung;
- 7) Kawasan peruntukan perkebunan, terdiri atas perkebunan karet meliputi Kecamatan Telaga langsung, Kecamatan Padang Batung, Kecamatan Loksado, Kecamatan Sungai Raya, dan Kecamatan Angkinang;
- 8) Kawasan peruntukan perkebunan, terdiri atas perkebunan kelapa sawit meliputi Kecamatan Angkinang, Kecamatan Daha Barat, Kecamatan Daha Selatan, Kecamatan Daha Utara, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Kandangan, dan Kecamatan Simpur;
- 9) Kawasan peruntukan perkebunan, terdiri atas perkebunan kayu manis berada di Kecamatan Loksado;
- 10) Kawasan peruntukan perkebunan, terdiri atas perkebunan kelapa meliputi Kecamatan Simpur, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan

Sungai Raya, Kecamatan Padang Batung, Kecamatan Telaga Langsung, Kecamatan Kandangan, dan Kecamatan Angkinang;

- 11) Kawasan peruntukan peternakan, terdiri atas peternakan sapi potong pada daerah sentra sapi meliputi Kecamatan Simpur, Kecamatan Kalumpang, dan Kecamatan Sungai Raya;
- 12) Kawasan peruntukan peternakan, terdiri atas peternakan sapi potong pada daerah pengembangan meliputi Kecamatan Kandangan, Kecamatan Padang Batung, dan Kecamatan Angkinang, Kecamatan Telaga Langsung, dan Kecamatan Loksado;
- 13) Kawasan peruntukan peternakan, terdiri atas peternakan kerbau rawa meliputi Kecamatan Daha Barat, dan Kecamatan Daha Utara;
- 14) Kawasan peruntukan peternakan, terdiri atas peternakan kambing meliputi seluruh Kecamatan;
- 15) Kawasan peruntukan peternakan, terdiri atas peternakan domba meliputi Kecamatan Kandangan, dan Kecamatan Daha Selatan;
- 16) Kawasan peruntukan peternakan, terdiri atas peternakan ayam buras dan ayam ras meliputi seluruh Kecamatan;
- 17) Kawasan peruntukan peternakan, terdiri atas peternakan itik pada daerah sentra meliputi Kecamatan Daha Utara;
- 18) Kawasan peruntukan peternakan, terdiri atas peternakan itik pada daerah pengembangan meliputi Kecamatan Daha Selatan, Kecamatan Daha Barat, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Simpur, dan Kecamatan Angkinang;
- 19) Kawasan peruntukan perikanan, terdiri atas perikanan tangkap yang terdapat di sekitar sungai besar dan danau meliputi Kecamatan Daha

- Barat, Kecamatan Daha Selatan, Kecamatan Daha Utara, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Simpur, dan Kecamatan Kalumpang;
- 20) Kawasan peruntukan perikanan, terdiri atas budidaya perikanan pada pengembangan kawasan perikanan kolam meliputi Kecamatan Kandangan, Kecamatan Daha Selatan, dan Kecamatan Kalumpang;
 - 21) Kawasan peruntukan perikanan, terdiri atas budidaya perikanan pada pengembangan kawasan perikanan keramba meliputi Kecamatan Daha Selatan, Kecamatan Daha Utara, dan Kecamatan Daha Barat;
 - 22) Kawasan peruntukan perikanan, terdiri atas pengolahan ikan meliputi Kecamatan Daha Selatan, Kecamatan Daha Utara, Kecamatan Daha Barat, Kecamatan Kandangan, dan Kecamatan Kalumpang;
 - 23) Kawasan peruntukan perikanan, terdiri atas perikanan minapolitan berada di Desa Muning Kecamatan Daha Selatan;
 - 24) Kawasan peruntukan pertambangan, terdiri atas mineral logam seperti emas berada pada Kecamatan Loksado. Mineral logam seperti mangan meliputi Desa Tambak Pipi'I, dan Desa Mawangi, Kecamatan Padang Batung. Mineral logam seperti mangan meliputi Desa Malaris, Desa Haruyan, Desa Bumbuyanin, Desa Kamawakan, Desa Sungai Tinggiran, dan Desa Sungai Landuyan Kecamatan Loksado;
 - 25) Kawasan peruntukan pertambangan, terdiri atas mineral bukan logam seperti pasir kuarsa berada pada Desa Malilingin Kecamatan Padang Batung. Mineral bukan logam seperti fosfat meliputi Desa Gunung Batu Laki, Desa Gunung Batu Bini Kecamatan Padang Batung, Desa Gunung Liang Mandala, dan Desa Gunung Burit Sanga Kecamatan Telaga Langsat. Mineral bukan logam seperti lempung meliputi Desa

Karang Jawa, Desa Jambu Hulu, Desa Madang, Desa Pandulangan di Kecamatan Padang Batung, Desa Angkinang Kecamatan Angkinang, Desa Mandala, Desa Ambutun, Desa Taniti, dan Desa Pakuan Kecamatan Telaga Langsat;

- 26) Kawasan peruntukan pertambangan, terdiri atas batuan seperti Marmer berada pada Desa Datar Kedayang, Desa Gunung Langara, dan Desa Gunung Kantawan Kecamatan Loksado. Batuan seperti granit berada di Desa Kamawakan Kecamatan Loksado. Batuan seperti Andesit berada di Kecamatan Loksado. Batuan seperti gabbro berada di Kecamatan Padang Batung. Batu seperti basalt berada di Kecamatan Loksado. Tanah liat berada pada Desa Haratai Kecamatan Loksado, Desa Padang Batung, dan Desa Durian Rabung Kecamatan Padang Batung. Tanah urung berada pada Desa Karang Jawa, Desa Jambu Hulu, Desa Madang, Desa Pandulangan Kecamatan Padang Batung, Desa Angkinang Kecamatan Angkinang, Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya, Desa Mandala, Desa Ambutun, Desa Taniti, dan Desa Pakuan Kecamatan Telaga Langsat. Kerikil berpasir alam (sirtu) berada di Desa Padang Batung, dan Desa Tambak Pipi'I Kecamatan Padang Batung. Batu gamping meliputi sepanjang Sungai Amandit di Kecamatan Padang Batung, dan sepanjang Sungai Amandit di Kecamatan Sungai Raya. Terdiri atas batu bara seperti bitumen padat berada pada Desa Gunung Batu Laki, Desa Gunung Batu Bini, Desa Tayub, Desa Mandapati di Kecamatan Padang Batung, Desa Gunung Liang Mandala, Desa Gunung Burit Sanga di

Kecamatan Telaga Langsat, Desa Datar Kedayang, Desa Haratai, dan Desa Tanuhi di Kecamatan Loksado;

- 27) Kawasan peruntukan industri, terdiri atas industri kecil dan mikro seperti industri Dodol Kandangan meliputi Desa Kapuh Kecamatan Simpur, Desa Telaga Bidadari, Desa Hamalau, Desa Hariti Kecamatan Sungai Raya, Desa Gambah Luar, Desa Kandangan Barat, dan Desa Kandangan Utara Kecamatan Kandangan. Terdiri atas industri kecil dan mikro seperti industri kerupuk berada di Desa Bamban Utara Kecamatan Angkinang. Terdiri atas industri kecil dan mikro seperti industri ikan kering berada pada Desa Bangkau Kecamatan Kandangan, Desa Bago Tanggul Kecamatan Kalumpang, Desa Muning, dan Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan. Terdiri atas industri kecil dan mikro seperti industri propeler berada pada Desa Panggandingan, dan Desa Pekapuran Kecil Kecamatan Daha Utara. Terdiri atas industri kecil dan mikro seperti industri imitasi berada di Desa Habirau Kecamatan Daha Selatan. Terdiri atas industri kecil dan mikro seperti industri pandai besi berada pada Desa Sungai Pinang, dan Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan. Terdiri atas industri kecil dan mikro seperti industri gerabah berada di Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan. Terdiri atas industri kecil dan mikro seperti industri kue kering berada pada Desa Telaga Bidadari Kecamatan Sungai Raya, dan Desa Kapuh Kecamatan Simpur. Terdiri atas industri kecil dan mikro seperti industri anyaman bambu berada pada Desa Malinau, Desan Ulang, dan Desa Panggungan Kecamatan Loksado. Terdiri atas industri kecil dan mikro seperti industri

anyaman purun berada pada Desa Balimau, dan Desa Karang Bulan Kecamatan Kalumpang. Terdiri atas industri kecil dan mikro seperti industri kumpang parang berada pada Desa Sarang Halang, dan Desa Sungai Raya Utara Kecamatan Sungai Raya. Terdiri atas industri kecil dan mikro seperti industri gula merah berada meliputi Desa Jambu Hulu, Desa Jambu Hilir Kecamatan Kandangan, Desa Baru Hulu, Desa Baru Tengah, Desa Asam-Asam, Desa Tamiyang, Desa Karasikan, Desa Batang Kulur Kanan, Desa Batang Kulur Kiri, dan Desa Bumi Berkat Kecamatan Sungai Raya;

- 28) Kawasan peruntukan pariwisata, terdiri atas pariwisata budaya seperti wisata budaya lokal meliputi Balai Adat Dayak di Kecamatan Loksado, Rumah Adat Banjar Bumbungan Tinggi di Desa Habirau Kecamatan Daha Selatan, Rumah Adat Banjar Gajah Manyusu di Desa Amawang Kecamatan Kandangan, Upacara Aruh Ganal di Hulu Sungai Selatan, Seni Tradisional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Lomba Jukung Tradisional (Perahu Naga) di Kecamatan Daha Selatan, Olahraga Tradisional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalang Hadangan di Kecamatan Daha Utara. Terdiri atas pariwisata budaya seperti wisata budaya sejarah meliputi Tugu/Monumen Teks Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan 17 Mei 1949 di Desa Ni'ih Kecamatan Loksado, Tugu Peringatan Penyusunan Teks Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV di Kecamatan Telaga Langsat, Tugu Peringatan Peristiwa Pemencaran Pasukan ALRI Divisi IV 10 Mei 1949 di Pagat Batu Desa Batu Bini Kecamatan Padang Batung, Tugu Gencatan Senjata Antara Gubernur

Tentara ALRI Divisi IV dengan NICA di Kecamatan Sungai Raya, Monumen Mandapai, Upacara HUT ke-IV RI 17 Agustus 1949 di Desa Mandapai Kecamatan Padang Batung, Tugu Palagan Nagara 2 Januari 1949 di Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara, Tugu Garis Demarkasi di Desa Karang Jawa Kecamatan Padang Batung, Tugu Peringatan Markas Daerah Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan di Desa Jelatang Kecamatan Padang Batung, Gedung Juang Devisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan di Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya, Situs Benteng Madang di Desa Madang Kecamatan Padang Batung, Situs Amuk Hantarukung di Desa Hantarukung Kecamatan Simpur, Makam Tumpang Talu di Kandangan Barat Kecamatan Kandangan, Kubur Anam di Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya, Makam Singakarsa di Jln. Singakarsa Kecamatan Kandangan, Makam Aluh Idut di Jln. Aluh Idut Kecamatan Kandangan, dan Makam Ning Bulang di Desa Hantarukung Kecamatan Simpur. Terdiri atas pariwisata budaya seperti wisata budaya religi meliputi Mesjid Su'ada di Desa Wasah Hilir Kecamatan Simpur, Makam H. M Said di Desa Simpur Kecamatan Simpur, Makam Datu H. Abbas di Desa Simpur Kecamatan Simpur, Kubah Datu Durabu di Desa Kalumpang Kecamatan Kalumpang, Kubah Taniran di Desa Taniran Kecamatan Angkinang, Makam Keramat Datu H.M Rais di Desa Loknyiur Kecamatan Angkinang, Makam Datu Daha Kecamatan Daha Utara, Makam Surgi Tuan di Desa Pasungkan Kecamatan Daha Utara, Makam Habib Ibrahim Desa Mandala Kecamatan Daha Utara, Makam Tuan Guru H. Ali di Desa Pandansari Kecamatan Daha Selatan,

Makam Habib Lumpangi di desa Lumpangi Kecamatan Loksado. Terdiri atas pariwisata budaya seperti wisata budaya alam meliputi Wisata Alam Loksado di Kecamatan Loksado, Air Terjun Haratai di Kecamatan Loksado, Air Panas Tanuhi di Desa Tanuhi Kecamatan Loksado, Gunung Kentawan di Desa Tanuhi Kecamatan Loksado, Danau Bangkau di Desa Kecamatan Kandangan, Delta dan Dam Sungai Amandit di Desa Malutu Kecamatan Padang Batung, Riam Anai di Desa Lok Lahung Kecamatan Loksado, Air Terjun Kilap Api di Desa Tanuhi Kecamatan Loksado, Air Terjun Uring di Desa Kamawakan Kecamatan Loksado, Air Terjun Tangkaramin di Desa Malinau Kecamatan Loksado, Air Terjun Tinggiran Hayam di Desa Kamawakan Kecamatan Loksado, Air Panas Mandapai di Desa Bini Kecamatan Padang Batung, dan Telaga Bidadari di Desa Telaga Bidadari Kecamatan Sungai Raya;

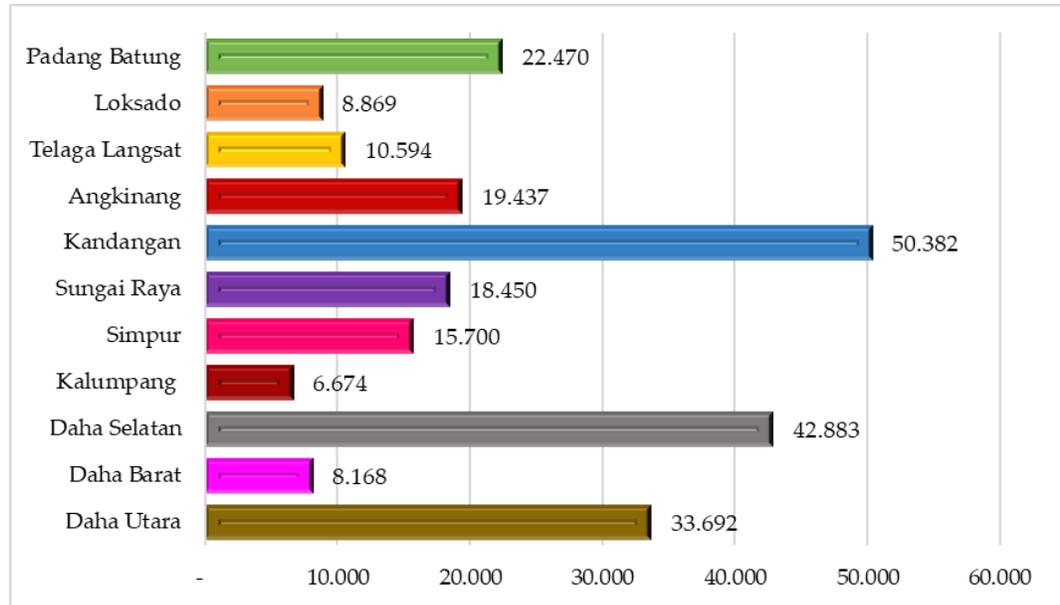
- 29) Kawasan peruntukan permukiman, terdiri atas permukiman perkotaan meliputi Kawasan Perkotaan Kandangan di Kecamatan Kandangan, Kawasan Perkotaan Angkinang di Kecamatan Angkinang, Kawasan Perkotaan Sungai Raya di Kecamatan Sungai Raya, Kawasan Perkotaan Nagara di Kecamatan Daha Selatan dan Daha Utara, Kawasan Perkotaan Simpur di Kecamatan Simpur, Kawasan Perkotaan Loksado di Kecamatan Loksado. Terdiri atas permukiman perdesaan berada di semua permukiman di luar kawasan Perkotaan di wilayah Kabupaten;
- 30) Kawasan peruntukan lainnya, terdiri atas perdagangan dan jasa meliputi Pasar Los Batu Kecamatan Kandangan, Pasar Nagara

Kecamatan Daha Selatan, Pasar Hewan Kecamatan Angkinang. Dan kawasan pertahanan dan keamanan seperti kawasan Militer Angkatan Darat berada di Kecamatan Kandangan, dan Rayon Militer Darat tersebar di wilayah Kabupaten. Dan juga terdiri atas pertahanan dan keamanan seperti kawasan kepolisian berada pada kepolisian resort di Kecamatan Sungai Raya, dan Kepolisian Sektor tersebar di wilayah Kabupaten.

4.2 Kondisi Demografi

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2023 sebanyak 237.319 jiwa yang terdiri atas 119.293 jiwa penduduk laki-laki dan 118.026 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2022 sebanyak 234.909 jiwa, penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 1,02%. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101,07. Kepadatan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2023 mencapai 131 jiwa/km².

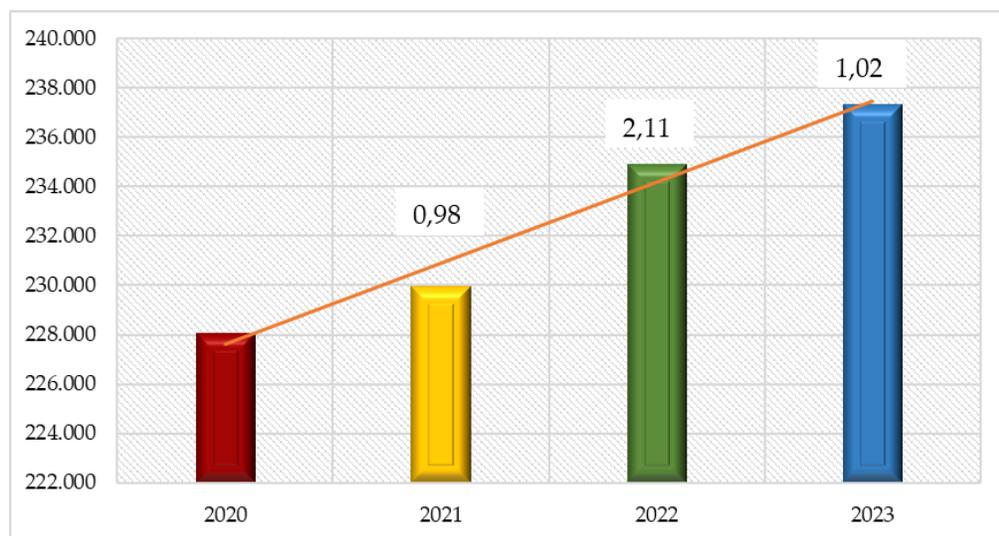
Kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Kandangan dengan kepadatan sebesar 472 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Loksado sebesar 26 jiwa/km². Berikut klasifikasi jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan:



Gambar 4.2 Grafik Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2023

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama kurun waktu 4 tahun mengalami pertumbuhan yang positif, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

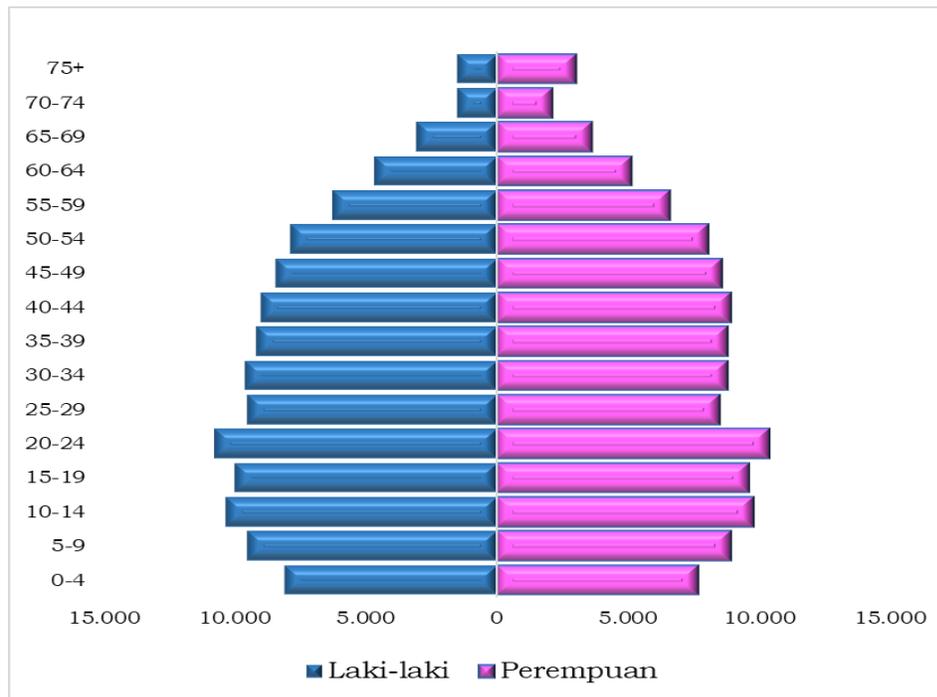


Gambar 4.3 Laju Pertumbuhannya di Kab. Hulu Sungai Selatan, Tahun 2020-2023

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2023

Selanjutnya dijelaskan jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dianalisis menggunakan grafik piramida kependudukan. Umur dan jenis kelamin merupakan karakteristik penduduk yang penting untuk diketahui. Dengan mengetahui susunan penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin, dapat di ketahui perubahan-perubahan yang terjadi dari satu masa ke masa yang lain. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat digunakan untuk mengetahui rasio jenis kelamin (*Sex ratio*) dan angka ketergantungan (*Dependency ratio*).

Berikut secara jelas dapat digambarkan pada grafik piramida penduduk berdsarkan kelompok umur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tahun 2023:



Gambar 4.4. Piramida Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Gambar 4.3 estimasi piramida penduduk berdasarkan kelompok umur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2023 menunjukkan kelompok produktif relative besar (usia 15-50 tahun), yang disusul akan menjadi produktif pada (usia 5-14 tahun). Dari data jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan kelompok umur dapat digunakan untuk mengetahui *Dependency Ratio* atau angka ketergantungan.

Untuk mengetahui *Dependency Ratio* suatu wilayah dihitung dengan rumus:

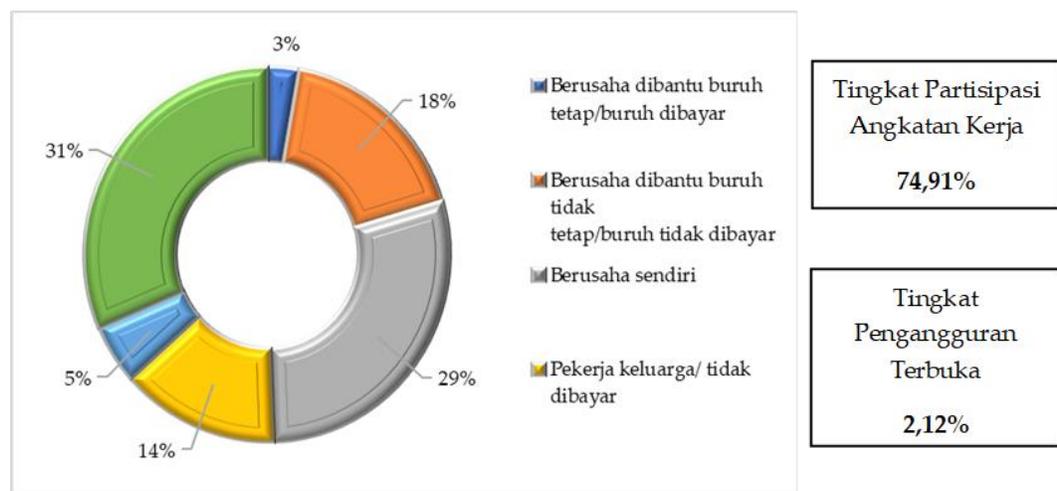
$$\begin{aligned}
 \text{Dependency} &= \frac{P(0 - 14) + (> 65)}{P(15 - 64)} \times 100 \\
 &= \frac{(54.178) + (14.901)}{168.240} \times 100 \\
 &= \frac{69.079}{168.240} \times 100 \\
 &= 41,06 = \mathbf{41}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas dapat diketahui bahwa angka ketergantungan atau angka beban tanggungan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 41 jiwa. Artinya setiap 100 jiwa usia produktif di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tanggungan 41 jiwa usia belum produktif dan tidak produktif. Atas dasar tersebut maka, Ratio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) menunjukkan kondisi yang bagus karena berada di kisaran <50%.

Dalam analisisnya, semakin sedikit beban tanggungan masyarakat semakin baik untuk perekonomian daerah setempat, karena penduduk

yang berusia produktif mempunyai beban tanggungan yang sedikit. Ini artinya pendapatan yang diperoleh tidak dipakai untuk memenuhi kebutuhan beban tanggungan yang banyak, karena mempunyai beban tanggungan hanya sedikit. Realitas ini adalah kabar baik dalam pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Apabila *Dependency Ratio* atau angka ketergantungan ini menjadi ukuran dalam melakukan pemekaran kecamatan, maka dapat dikatakan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan layak untuk dimekarkan.

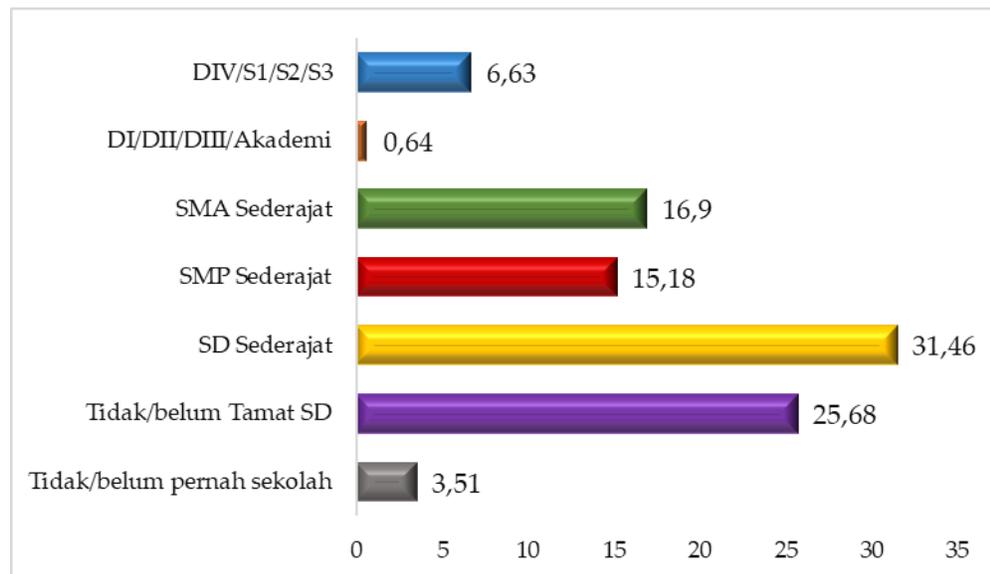
Kemudian pada tahun 2023 persentase penduduk angkatan kerja sebesar 74,91 persen dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 2,12 persen. Sementara itu, penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bukan angkatan kerja sebagian besar mengurus rumah tangga yaitu 16,62 persen dari 25,09 persen penduduk bukan angkatan kerja, sebagaimana pada gambar yang ditampilkan berikut ini:



Gambar 4.5: Diagram Ketenagakerjaan Tahun 2023
 Sumber: BPS dalam angka 2024

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Perindustrian tahun 2023 sebesar 859 pekerja. Pekerja yang terdaftar sebesar 648 telah ditempatkan bekerja. Proporsi terbesar pencari kerja yang terdaftar berpendidikan terakhir SMA/SMK/Sederajat yaitu sebesar 84,17 persen (723 pekerja) dan yang ditempatkan sebanyak 171 pekerja di tahun 2023.

Berikut ditampilkan dalam bentuk grafik persentase penduduk usia 5 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi ditamatkan tahun 2023, dibawah ini:



Gambar 4.6: Grafik Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Ditamatkan Tahun 2023

Sumber: BPS dalam angka 2024

Dari gambar 4.6 diketahui bahwa yang menduduki proporsi terbesar yaitu 31,46 masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada pada tingkat pendidikan SD sederajat. Kemudian diposisi kedua sebesar 25,68% berada pada tingkat pendidikan tidak/belum tamat SD, disusul dengan

tingkat pendidikan SMA sederajat sebesar 16,9%. Dan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tingkat pendidikan SMA sederajat sebesar 16,9% dan tingkat tinggi seperti DIV/ S1/ S3 hanya sebesar 6,63%. Melihat gambaran tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini pemerintah daerah perlu memperhatikan tingkat pendidikan masyarakat agar memiliki pendidikan yang layak.

Kemudian dari tahun 2015 hingga tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 2,44%, sebagaimana yang tergambar pada grafik Persentase Penduduk Miskin Tahun 2015-2023 berikut ini:



Gambar 4.7: Grafik Persentase Penduduk Miskin Tahun 2015-2023

Sumber: BPS dalam angka 2024

BAB V

ANALISIS HASIL KAJIAN

5.1 Analisis PAD dan DAU Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dengan Belanja Pemerintah Sebagai Pemoderasi

5.1.1 Analisis Deskriptif

➤ Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang bersumber dari wilayah itu sendiri, semakin tinggi PAD suatu daerah maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki untuk melakukan pembangunan daerahnya. PAD adalah salah satu indikator kemandirian pada otonomi daerah dalam menggali potensi untuk meningkatkan sumber sumber penerimaannya, dimana semakin besar pendapatan asli daerah maka semakin mandiri suatu daerah dalam mengambil keputusan dan kebijakan pembangunan.

Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal (1) ayat 20 bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PAD Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada periode 2004- 2023 (selama 20 tahun) pertumbuhannya mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Rata- rata pertumbuhan per tahun selama 20 tahun terakhir

mencapai 18,82%, keadaan ini menunjukkan pertumbuhan yang tinggi. Kalau dilihat pertumbuhan per tahunnya ada 5(lima) tahun yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu pada tahun 2005 (-8,65%), tahun 2008 (-0,44%), tahun 2010 (-0,79%), tahun 2018 (-7,57%), dan tahun 2022 (-32,83%), pada tahun 2022 ini sangat besar penurunannya keadaan ini disebabkan adanya bencana Covid-19. Kemudian ada sebanyak 15 tahun penerimaan PAD yang mengalami kenaikan. Secara keseluruhan kinerja penerimaan PAD baik. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan PAD
Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2004-2023

No	Tahun	PAD (Rp1.000)	Pertumbuhan PAD (%)
1	2004	11.734.211	-
2	2005	10.719.545	-8,65
3	2006	17.453.411	62,82
4	2007	22.429.258	28,51
5	2008	22.331.666	-0,44
6	2009	28.152.514	27,08
7	2010	27.931.098	-0,79
8	2011	41.712.778	49,34
9	2012	45.107.436	8,14
10	2013	54.748.428	21,37
11	2014	85.095.560	55,43
12	2015	101.673.712	19,48
13	2016	115.118.953	13,22
14	2017	142.495.390	23,78
15	2018	131.711.751	-7,57
16	2019	168.032.651	27,58
17	2020	228.254.826	35,84
18	2021	247.697.935	8,52
19	2022	166.386.113	-32,83

20	2023	210.796.884	26,69
Rata-rata			18,82

Sumber: Pemerintah Kab. HSS dan BPS Kab HSS, diolah kembali

➤ Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal (1) ayat 71 bahwa yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah. Kemudian yang dimaksud dengan Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana transfer pemerintah pusat yang terikat dengan pengeluaran tertentu dengan tujuan untuk menutup celah fiskal yang disebabkan karena kebutuhan suatu daerah lebih besar dari potensi penerimaan daerah. Besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) menjadi penentu besaran DAU dari suatu daerah, celah fiskal (*fiscal gap*) merupakan selisih dari perhitungan *fiscal need* dengan *fiscal capacity*. Dapat disimpulkan bahwa DAU merupakan bentuk penerimaan pemerintah daerah yang bersumber dari APBN/Pemerintah Pusat dengan tujuan untuk meratakan kemandirian keuangan daerah dan menutup celah fiskal dalam rangka menjalankan desentralisasi fiskal.

Penerimaan DAU Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada periode 2004- 2023 (selama 20 tahun) pertumbuhannya mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Rata- rata pertumbuhan per tahun selama 20 tahun terakhir mencapai 7,62%, keadaan ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi (tabel 5.2).

Jika dilihat pertumbuhan per tahunnya ada 4(empat) tahun yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu pada tahun 2017 (-1,76%), tahun 2020 (-10,42%), tahun 2021 (-1,52%), dan tahun 2022 (-0,18%), pada tahun 2022 ini sangat besar penurunannya keadaan ini disebabkan adanya bencana Covid-19. Kemudian ada sebanyak 16 tahun penerimaan DAU yang mengalami kenaikan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut ini.

Tabel 5.2
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pertumbuhan DAU
Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2004-2023

No	Tahun	DAU (Rp1.000)	Pertumbuhan DAU (%)
1	2004	139.608.000	-
2	2005	153.812.000	10,17
3	2006	246.014.000	59,94
4	2007	269.401.929	9,51
5	2008	293.908.862	9,10
6	2009	294.246.568	0,11
7	2010	298.470.960	1,44
8	2011	324.267.511	8,64
9	2012	388.394.992	19,78
10	2013	452.522.473	16,51
11	2014	478.093.768	5,65
12	2015	482.751.537	0,97
13	2016	532.162.390	10,24
14	2017	522.814.008	-1,76

15	2018	522.814.008	0,00
16	2019	538.186.183	2,94
17	2020	482.100.383	-10,42
18	2021	474.753.627	-1,52
19	2022	473.900.465	-0,18
20	2023	491.370.004	3,69
Rata-rata			7,62

Sumber: Pemerintah Kab. HSS dan BPS Kab HSS, diolah kembali

➤ **Belanja Daerah**

Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat (14) bahwa yang dimaksud dengan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Selanjutnya pada pasal 140 mengamanatkan bahwa Belanja Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan: a. kerangka pengeluaran jangka menengah daerah; b. penganggaran terpadu; dan c. penganggaran berbasis kinerja.

Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada periode 2004-2023 (selama 20 tahun) pertumbuhannya mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Rata- rata pertumbuhan per tahun selama 20 tahun terakhir mencapai 13,60%, keadaan ini menunjukkan pertumbuhan belanja daerah yang tinggi (tabel 5.3). Jika dilihat pertumbuhan per tahunnya ada 4(empat) tahun yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu pada tahun 2010 (-8,69%), tahun 2017 (-9,17%), tahun 2020 (5,65-%), dan tahun 2022 (-0,83%), pada tahun 2022 ini sangat besar penurunannya keadaan ini disebabkan adanya bencana Covid-19. Kemudian ada sebanyak 16 tahun belanja daerah yang mengalami kenaikan. Selengkapny dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini.

➤ **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses peningkatan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara/daerah dapat diukur dengan cara membandingkan PDB/PDRB tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada periode 2004- 2023 (selama 20 tahun) pertumbuhannya mengalami fluktuasi tetapi kelihatannya cukup stabil. Rata- rata pertumbuhan per tahun selama 20 tahun terakhir mencapai 4,79%, keadaan ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (tabel 5.3). Jika dilihat pertumbuhan per tahunnya hanya ada 1(satu) tahun yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu pada tahun 2020 (-1,19%), kemudian ada sebanyak 19 tahun yang mengalami pertumbuhan ekonomi, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini.

Tabel 5.3

Belanja Daerah, Pertumbuhan Belanja Daerah dan Petumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2004-2023

No	Tahun	Belanja Daerah (Rp1.000)	Pertumbuhan Belanja Daerah (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2004	170.938.181	-	4,49
2	2005	183.617.541	7,42	3,51
3	2006	260.587.886	41,92	4,97

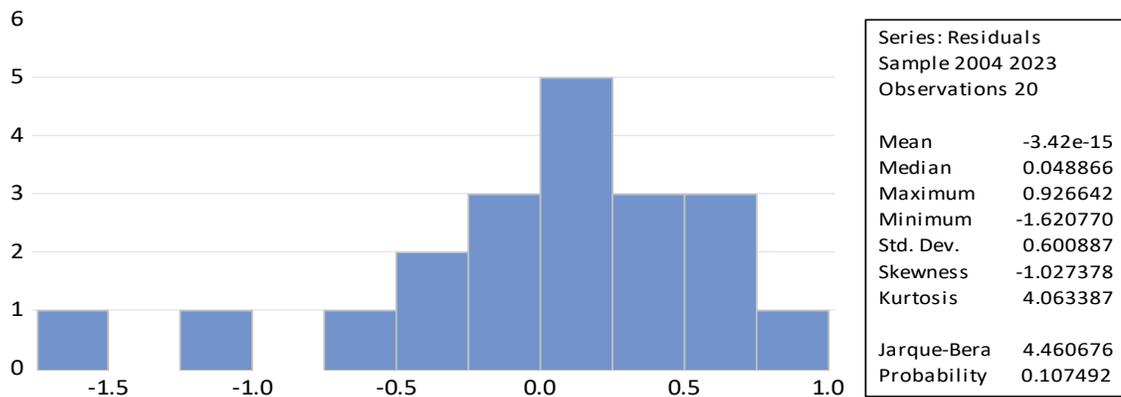
4	2007	399.545.934	53,32	5,11
5	2008	478.973.820	19,88	5,13
6	2009	547.092.674	14,22	5,04
7	2010	499.541.679	-8,69	3,46
8	2011	635.573.011	27,23	5,48
9	2012	722.208.830	13,63	5,18
10	2013	792.561.666	9,74	5,68
11	2014	887.367.010	11,96	5,79
12	2015	1.234.231.773	39,09	6,05
13	2016	1.327.060.321	7,52	6,08
14	2017	1.205.337.331	-9,17	6,12
15	2018	1.257.396.522	4,32	6,14
16	2019	1.406.270.395	11,84	5,28
17	2020	1.326.747.578	-5,65	-1,19
18	2021	1.420.783.809	7,09	4,19
19	2022	1.408.914.769	-0,83	4,02
20	2023	1.598.649.439	13,47	5,27
Rata-rata			13,60	4,79

Sumber: Pemerintah Kab. HSS dan BPS Kab HSS, diolah kembali.

5.1.2 Hasil Statistik Dengan EViews

5.1.2.1 Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas



Gambar 5.1 : Grafik Uji Normalitas

Sumber : Data Primer, 2024

Normalitas menggunakan uji Jarque Bera yaitu data berdistribusi normal apabila hasil pengujian data menunjukkan nilai Prob. > 0,05. Dari tabel pada grafik diatas didapatkan hasil Probability 0,107492 yang artinya lebih besar dari 0,05 sehingga data dikatakan terdistribusi normal.

b) Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
 Date: 08/05/24 Time: 12:17
 Sample: 2004 2023
 Included observations: 20

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	162.1746	7564.729	NA
PAD	0.151787	2283.481	7.128324
DAU	0.913563	16581.82	6.649008
@ISPERIOD("2020")	0.545889	1.273164	1.209506

Dari analisis regresi data dengan evIEWS didapatkan nilai *Centered VIF* variabel independen pada tabel yaitu PAD = 7,128 dan DAU = 6,649. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan, apabila nilai *Centered VIF* < 10 data terbebas dari multikolinearitas. Maka dari hasil regresi diatas dapat dinyatakan bahwa data terbebas dari multikolinearitas.

c) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.129093	Prob. F(3,16)	0.3669
Obs*R-squared	3.494333	Prob. Chi-Square(3)	0.3215
Scaled explained SS	3.556913	Prob. Chi-Square(3)	0.3135

Test Equation:
Dependent Variable: ARESID
Method: Least Squares
Date: 08/05/24 Time: 12:30
Sample: 2004 2023
Included observations: 20

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.20803	7.866528	1.424774	0.1734
PAD	0.348288	0.240663	1.447203	0.1671
DAU	-0.861429	0.590420	-1.459011	0.1639
@ISPERIOD("2020")	-0.688052	0.456398	-1.507571	0.1512
R-squared	0.174717	Mean dependent var		0.429438
Adjusted R-squared	0.019976	S.D. dependent var		0.408586
S.E. of regression	0.404484	Akaike info criterion		1.204448
Sum squared resid	2.617718	Schwarz criterion		1.403594
Log likelihood	-8.044476	Hannan-Quinn criter.		1.243323
F-statistic	1.129093	Durbin-Watson stat		2.293358
Prob(F-statistic)	0.366949			

Dari perhitungan data dengan Eviews didapatkan nilai *P-value* variabel independen (0,1671 dan 0,1639) > 0,05, maka dapat dinyatakan data terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

d) Uji Autokorelasi

Dependent Variable: PERTUMBUHAN_EKONOMI
 Method: Least Squares
 Date: 08/05/24 Time: 12:29
 Sample: 2004 2023
 Included observations: 20
 Indicator Saturation: IIS, 20 indicators searched over 2 blocks
 1 IIS variable detected

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-37.64659	12.73478	-2.956203	0.0093
PAD	-0.732753	0.389598	-1.880791	0.0783
DAU	2.833354	0.955805	2.964365	0.0091
@ISPERIOD("2020")	-6.089996	0.738843	-8.242615	0.0000
R-squared	0.863498	Mean dependent var		4.790000
Adjusted R-squared	0.837904	S.D. dependent var		1.626384
S.E. of regression	0.654802	Akaike info criterion		2.167887
Sum squared resid	6.860242	Schwarz criterion		2.367034
Log likelihood	-17.67887	Hannan-Quinn criter.		2.206763
F-statistic	33.73810	Durbin-Watson stat		1.872596
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan tata cara pengambilan Keputusan apabila $dU < DW < (4-dU)$ maka data terbebas dari autokorelasi. Dari hasil perhitungan dan analisis regresi diketahui :

- ✓ Nilai dU dari tabel Durbin Watson = **1,5367**
- ✓ Nilai dU didapat dari tabel dengan ketentuan $n=20$ dan $K=2$
- ✓ Nilai DW dari tabel regresi diatas = **1,8726**
- ✓ Nilai $4 - dU$: $4 - 1,5367 = 2,4633$

Tabel : 5.4

Distribusi Nilai Tabel Durbin Watson
 Level of Significance $\alpha = 0,05$

n	k'=1		k'= 2		k'= 3		k'= 4		k'= 5	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
15	1.077	1.361	0.946	1.543	0.814	1.750	0.685	1.977	0.562	2.21
16	1.106	1.371	0.982	1.539	0.857	1.728	0.734	1.935	0.615	2.15

17	1.133	1.381	1.015	1.536	0.897	1.710	0.779	1.900	0.664	2.10
18	1.158	1.391	1.046	1.535	0.933	1.696	0.820	1.872	0.710	2.06
19	1.180	1.401	1.074	1.536	0.967	1.685	0.859	1.848	0.752	2.02
20	1.201	1.411	1.100	1.537	0.998	1.676	0.894	1.828	0.792	1.99
21	1.221	1.420	1.125	1.538	1.026	1.669	0.927	1.812	0.829	1.96
22	1.239	1.429	1.147	1.541	1.053	1.664	0.958	1.797	0.863	1.94
23	1.257	1.437	1.168	1.543	1.078	1.660	0.986	1.785	0.895	1.92
24	1.273	1.446	1.188	1.546	1.101	1.656	1.013	1.775	0.925	1.90
25	1.288	1.454	1.206	1.550	1.123	1.654	1.038	1.767	0.953	1.89
26	1.320	1.461	1.224	1.553	1.143	1.652	1.062	1.759	0.979	1.88
27	1.316	1.469	1.240	1.556	1.162	1.651	1.084	1.753	1.004	1.86
28	1.328	1.476	1.255	1.560	1.181	1.650	1.104	1.747	1.028	1.85
29	1.341	1.483	1.270	1.563	1.198	1.650	1.124	1.743	1.050	1.84
30	1.352	1.489	1.284	1.567	1.214	1.650	1.143	1.739	1.071	1.83
31	1.363	1.496	1.297	1.570	1.229	1.650	1.160	1.735	1.090	1.83
32	1.373	1.502	1.309	1.574	1.244	1.650	1.177	1.732	1.109	1.82
33	1.383	1.508	1.321	1.577	1.258	1.651	1.193	1.730	1.127	1.81
34	1.393	1.514	1.333	1.580	1.271	1.652	1.208	1.728	1.144	1.81
35	1.402	1.519	1.343	1.584	1.283	1.653	1.222	1.726	1.160	1.80
36	1.411	1.525	1.354	1.587	1.295	1.654	1.236	1.724	1.175	1.80
37	1.419	1.530	1.364	1.590	1.307	1.655	1.249	1.723	1.190	1.80
38	1.427	1.535	1.373	1.594	1.318	1.656	1.261	1.722	1.204	1.79
39	1.435	1.540	1.382	1.597	1.328	1.658	1.273	1.722	1.218	1.79
40	1.442	1.544	1.391	1.600	1.338	1.659	1.285	1.721	1.230	1.79
45	1.475	1.566	1.430	1.615	1.383	1.666	1.336	1.720	1.287	1.78

Dari hasil perhitungan dan analisis regresi diperoleh $dU = 1,5367 < DW = 1,8726 < (4-dU) = 2,4633$. Maka dapat disimpulkan data terbebas dari autokorelasi.

5.1.2.2 Hasil Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk melihat hubungan pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Menurut Sujarweni (2018:189) jika pada pengujian uji normalitas dan uji asumsi klasik sudah memenuhi persyaratan, maka analisis data menggunakan

regresi linear berganda dapat dilanjutkan. Berdasarkan hasil uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi menunjukkan bahwa data sudah memenuhi syarat untuk dilakukan uji regresi linear berganda. Dalam penelitian ini analisis data menggunakan aplikasi pengolah data IBM SPSS versi 25, dengan data variabel independen yang digunakan berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi. Berikut ini merupakan hasil analisis Regresi Linear Berganda dari data variabel yang telah diolah:

Dependent Variable: PERTUMBUHAN_EKONOMI
 Method: Least Squares
 Date: 08/05/24 Time: 12:29
 Sample: 2004 2023
 Included observations: 20
 Indicator Saturation: IIS, 20 indicators searched over 2 blocks
 1 IIS variable detected

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-37.64659	12.73478	-2.956203	0.0093
PAD	-0.732753	0.389598	-1.880791	0.0783
DAU	2.833354	0.955805	2.964365	0.0091
@ISPERIOD("2020")	-6.089996	0.738843	-8.242615	0.0000
R-squared	0.863498	Mean dependent var		4.790000
Adjusted R-squared	0.837904	S.D. dependent var		1.626384
S.E. of regression	0.654802	Akaike info criterion		2.167887
Sum squared resid	6.860242	Schwarz criterion		2.367034
Log likelihood	-17.67887	Hannan-Quinn criter.		2.206763
F-statistic	33.73810	Durbin-Watson stat		1.872596
Prob(F-statistic)	0.000000			

Hasil analisis Regresi Linear Berganda a, b, dan c berdasarkan hasil olah data Eviews

- a. Mengetahui secara simultan pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Secara Simultan: Dari hasil analisis regresi didapatkan nilai *P-Value* sebesar $0,00 < 0,05$, maka dinyatakan bahwa PAD dan DAU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Mengetahui secara parsial pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Secara Parsial: Dari hasil analisis regresi didapatkan hasil sebagai berikut.

- 1) Nilai *Prob.* Variabel PAD sebesar $0,07 > 0,05$ maka dikatakan bahwa PAD berpengaruh tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- 2) Nilai *Prob.* Variabel DAU sebesar $0,009 < 0,05$ maka dikatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

- b. Mengetahui apakah Belanja Pemerintah sebagai variabel *moderating* mempengaruhi hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

❖ Uji MRA Model Regresi (1)

Dependent Variable: PERTUMBUHAN_EKONOMI
 Method: Least Squares
 Date: 08/05/24 Time: 14:44
 Sample: 2004 2023
 Included observations: 20

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	169.4706	362.1334	0.467978	0.6461
PAD	-16.17401	23.86619	-0.677696	0.5076
BELANJA_DAERAH	-4.592975	16.28351	-0.282063	0.7815
M1	0.597474	1.079226	0.553614	0.5875
R-squared	0.263152	Mean dependent var		4.790000
Adjusted R-squared	0.124993	S.D. dependent var		1.626384
S.E. of regression	1.521349	Akaike info criterion		3.853929
Sum squared resid	37.03206	Schwarz criterion		4.053075
Log likelihood	-34.53929	Hannan-Quinn criter.		3.892804
F-statistic	1.904705	Durbin-Watson stat		2.098542
Prob(F-statistic)	0.169545			

Keterangan: M1 merupakan hasil perkalian antara PAD (variabel independen) dengan Belanja Daerah (variabel moderasi), nilai *P-value* interaksi (M1) antara variabel independen PAD dengan variabel moderasi Belanja Daerah yaitu sebesar 0,5875 atau $> 0,05$. Maka berdasarkan ketentuan pengambilan keputusan dapat diartikan bahwa Belanja Daerah tidak mampu memoderasi hubungan *independent variable* PAD terhadap *dependent variable* Pertumbuhan Ekonomi.

❖ Uji MRA Model Regresi (2)

Dependent Variable: PERTUMBUHAN_EKONOMI
 Method: Least Squares
 Date: 08/05/24 Time: 14:46
 Sample: 2004 2023
 Included observations: 20

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	104.8332	623.1029	0.168244	0.8685
DAU	-1.491450	30.93752	-0.048208	0.9621
BELANJA_DAERAH	-11.37668	33.01053	-0.344638	0.7349
M2	0.401156	1.627650	0.246463	0.8085
R-squared	0.144265	Mean dependent var		4.790000
Adjusted R-squared	-0.016185	S.D. dependent var		1.626384
S.E. of regression	1.639493	Akaike info criterion		4.003508
Sum squared resid	43.00701	Schwarz criterion		4.202654
Log likelihood	-36.03508	Hannan-Quinn criter.		4.042383
F-statistic	0.899127	Durbin-Watson stat		1.989644
Prob(F-statistic)	0.463191			

Keterangan: M2 merupakan hasil perkalian antara DAU (variabel independen) dengan Belanja Daerah (variabel moderasi), nilai *P-value* interaksi (M2) antara variabel independen DAU dengan variabel moderasi Belanja Daerah yaitu sebesar 0,8085 atau $> 0,05$. Maka berdasarkan ketentuan pengambilan keputusan dapat diartikan bahwa Belanja Daerah tidak mampu memoderasi hubungan *independent variable* DAU terhadap *dependent variable* Pertumbuhan Ekonomi.

Dapat disimpulkan bahwa:

- 1) PAD dan DAU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- 2) PAD berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

- 3) DAU berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- 4) Belanja Daerah tidak mampu memoderasi hubungan *independent variable* PAD terhadap *dependent variable* Pertumbuhan Ekonomi.
- 5) Belanja Daerah tidak mampu memoderasi hubungan *independent variable* DAU terhadap *dependent variable* Pertumbuhan Ekonomi.

Jadi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah DAU. Secara matematis hasil analisis regresi dapat dinyatakan kedalam persamaan berikut ini:

$$Y = \alpha + B_1X_1 + B_2X_2 + e$$

$$Y = -37,65 - 0,73X_1 + 2,83X_2$$

Interprestasi dari persamaan regresi linear berganda tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar -37,65 ini merupakan nilai intersep, dapat diartikan bahwa apabila variabel independen X1 (PAD) dan X2 (DAU) tidak mengalami perubahan maka tingkat pertumbuhan ekonomi adalah sebesar -37,65.
- 2) Peningkatan nilai pada variabel X1 pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 1,00% maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,73%, tetapi tidak signifikan. Tetapi yang perlu diperhatikan nilai *Probability* Variabel PAD sebesar 0,07 > 0,05. Kalau dengan alfa 0,05 memang tidak signifikan tetapi itu (0,07) hampir mendekati. Artinya pemungutan PAD akan berdampak negative terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, terutama peningkatan PAD berupa pajak daerah.

3) Peningkatan nilai pada variabel X2 dana alokasi umum (DAU) sebesar 1,00% maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,83% dan signifikan. Peningkatan DAU sangat berperan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, hal ini disebabkan sumber penerimaan daerah yang terbesar di daerah ini adalah bersumber dari DAU.

Jadi penerimaan DAU di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, kemudian penerimaan PAD berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada $\alpha=0,05$. Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan cukup stabil dalam 20 tahun ini. Kemudian yang jadi pertanyaan, apakah pertumbuhan ekonomi daerah ini dirasakan juga oleh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

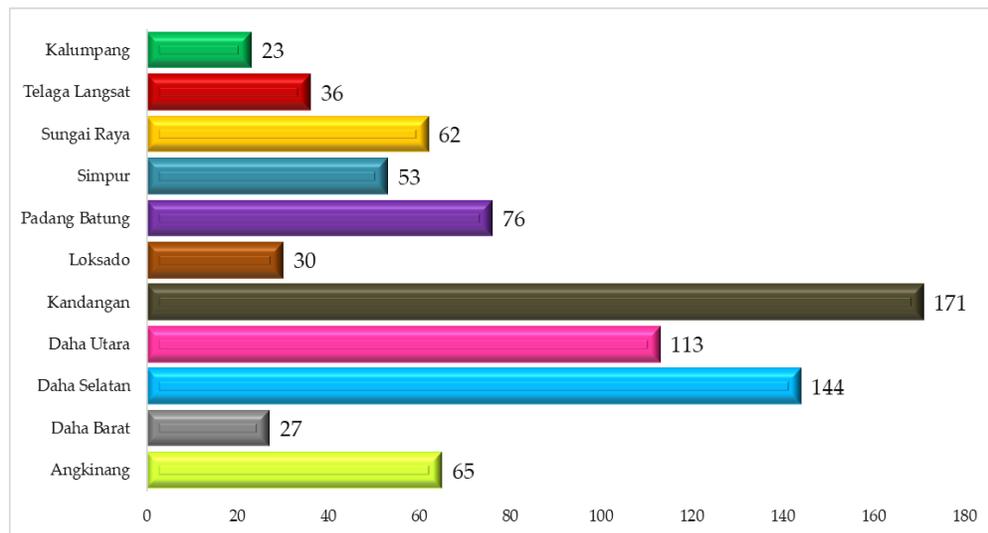
Dalam upaya mengetahui hasil/manfaat dari pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan apakah dirasakan juga oleh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka dilakukan riset Persepsi Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan sampel 800 responden yang tersebar di sebelas kecamatan. Teori digunakan untuk mengetahui manfaat pertumbuhan ekonomi terhadap masyarakat ini menggunakan teori indikator pertumbuhan ekonomi wilayah dari Rahardjo Adisasmita, 2014 ; Laurensius Julian, 2015 yang meliputi: (1). Keseimbangan Pendapatan, (2). Perubahan Struktur Perekonomian, (3). Pertumbuhan Kesempatan Kerja, (4). Tingkat dan Penyebaran Kemudahan, (5). Produk Domestik

Regional Bruto, (6). Sumber Daya Alam, (7). Mutu Pendidikan, (8). Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (9). Sistem Sosial, dan (10). Pasar.

5.2 Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan

5.2.1 Profil Responden

Survei persepsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan diambil total sampel sebanyak 800 responden yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan. Kemudian untuk penarikan sampel dilakukan dengan cara menggunakan rumus *multistage random sampling*. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini:



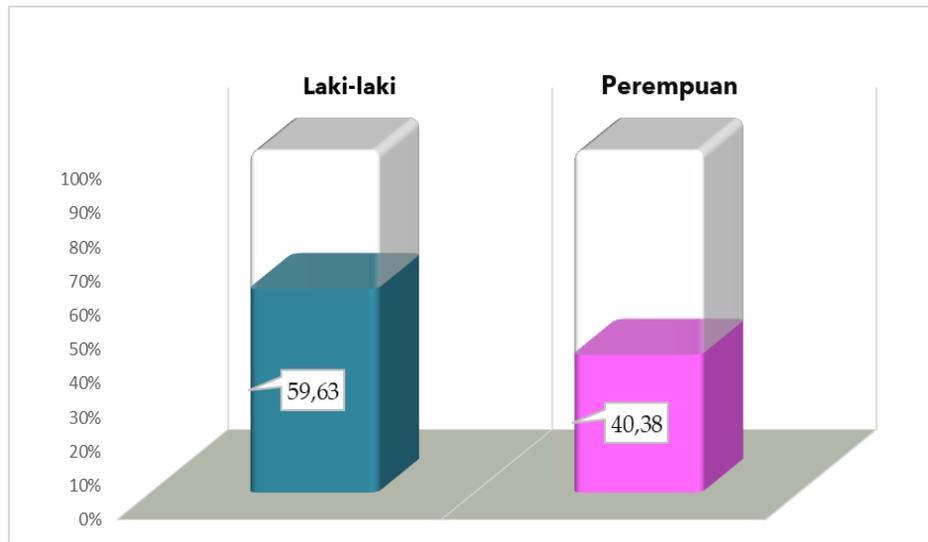
Gambar 5.2 : Grafik Sebaran Sampel Berdasarkan Kecamatan
Sumber : Hasil Penelitian, 2024

Dari gambar 5.1 diatas diterangkan bahwa sebaran sampel pada kajian ini sebanyak 171 responden atau sebesar 21,38% berada di Kecamatan Kandangan, kemudian pada Kecamatan Daha Selatan

sebanyak 144 responden atau sebesar 18,00% dan pada Kecamatan Daha Utara sebanyak 113 responden atau 14,13%. Selanjutnya pada Kecamatan Padang Batung sebanyak 76 responden atau sebesar 9,50%, disusul pada Kecamatan Angkinang sebanyak 65 responden atau sebesar 8,13%, dan sebanyak 62 responden atau sebesar 7,75% berada di Kecamatan Sungai Raya. Selanjutnya pada sampel pada kecamatan Simpur sebanyak 53 responden atau sebesar 6,63%, dan di Kecamatan Telaga Langsat sebanyak 36 responden atau sebesar 4,50%. Perhitungan sampel yang paling sedikit itu berada di Kecamatan Kalumpang sebanyak 23 responden atau sebesar 2,88%, Kecamatan Daha Darat sebanyak 27 responden atau sebesar 3,38% dan Kecamatan Loksado sebanyak 30 responden atau sebesar 3,75.

Proporsi profil responden dalam penelitian ini adalah pengelompokan responden berdasarkan jenis kelamin, yang dimaksudkan untuk mengetahui besarnya tingkat proporsi pengelompokan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa berdasarkan jenis kelamin maka responden didominasi oleh laki-laki sejumlah 477 orang atau sebanyak 59,63% sedangkan perempuan sejumlah 323 orang atau sebanyak 40,38%. Dapat dipahami bahwa kelihatannya responden laki-laki lebih aktif dalam melihat hasil kinerja pembangunan di daerahnya.

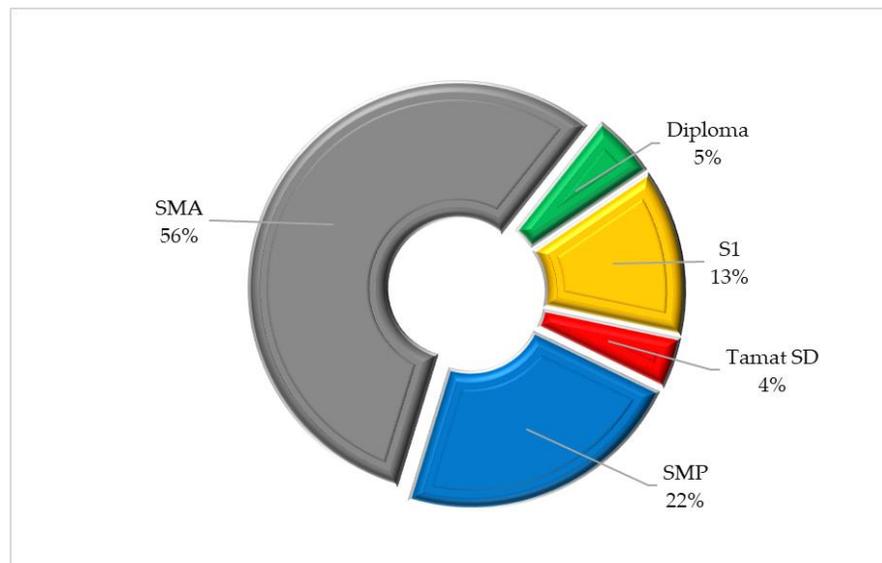
Lebih jelasnya untuk pengelompokan responden berdasarkan jenis kelamin pada kajian ini, sebagaimana tergambar pada grafik responden berdasarkan jenis kelamin berikut ini:



Gambar 5.3 : Grafik Responden Menurut Jenis Kelamin

Sumber : Hasil Penelitian, 2024

Selain menampilkan gambaran jenis kelamin responden, juga ditampilkan diagram tingkat pendidikan responden, sebagaimana berikut ini:

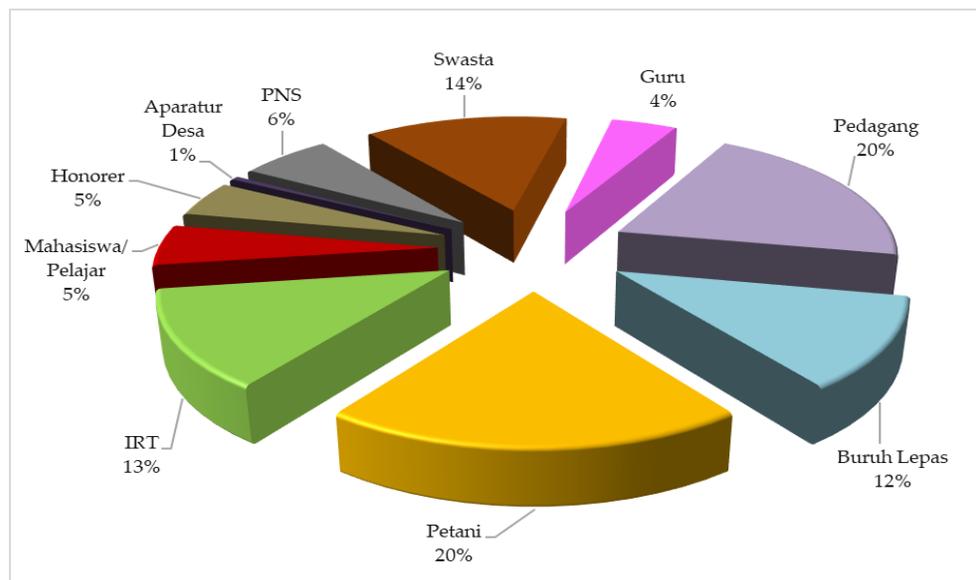


Gambar 5.4 : Diagram Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Sumber : Hasil Penelitian, 2024

Proporsi profil responden dalam penelitian ini adalah pengelompokan responden berdasarkan tingkat pendidikan, dari hasil penyebaran kuesioner terhadap responden. Berdasarkan data yang diperoleh yang tergambar pada gambar 5.3 mengenai diagram responden menurut tingkat pendidikan bahwa diperoleh sebanyak 4% responden berpendidikan tamat sekolah dasar (SD) dan sebanyak 22% responden berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kemudian sebanyak 56% responden berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), dan sebanyak 5% responden berpendidikan dengan lulusan jenjang program pendidikan Diploma, serta untuk responden yang tingkat pendidikannya sampai Sarjana Strata-1 (S1) sebesar 13%.

Pada kajian ini juga menampilkan gambaran responden menurut tingkat pendidikan, juga ditampilkan diagram responden menurut jenis pekerjaan, sebagaimana berikut ini:



Gambar 5.5 : Grafik Responden Menurut Jenis Pekerjaan
Sumber : Hasil Penelitian, 2024

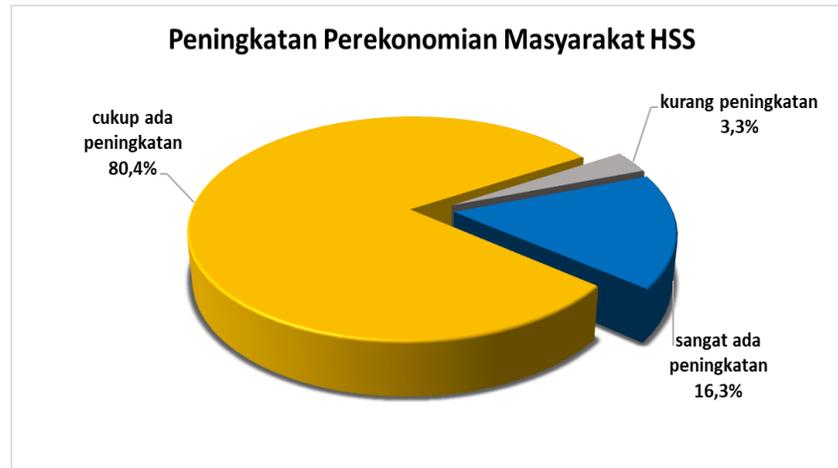
Berdasarkan pada gambar 5.4 mengenai diagram responden menurut tingkat pendidikan bahwa diperoleh responden dengan jumlah responden paling banyak adalah responden dengan jenis pekerjaan sebagai petani mencapai sebanyak 20%, dan kemudian diposisi berikutnya yaitu responden dengan jenis pekerjaan sebagai pedagang juga sebanyak 20%. Selanjutnya responden dengan jenis pekerjaan sebagai pekerja swasta sebanyak 14% dan sebesar 13% responden dengan jenis pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Kemudian sebesar 12% responden dengan jenis pekerjaan sebagai buruh lepas dan responden dengan jenis pekerjaan dengan status pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 6%, disusul dengan jenis pekerjaan sebagai Honorer sebanyak 5%. Kemudian responden dengan status sebagai seorang guru sebanyak 4% dan sebesar 1% responden dengan jenis pekerjaan sebagai aparatur desa, serta juga ditemui responden yang sudah bertatus sebagai pelajar/mahasiswa sebesar 5%.

5.2.2 Analisis Data Frekuensi

1) Keseimbangan Pendapatan

Peningkatan perekonomian masyarakat Hulu Sungai Selatan misalnya daya belanja masyarakat, ramainya orang beraktifitas dibidang ekonomi, perbaikan sandang dan papan/perumahan untuk keseimbangan pendapatan publik (pemerataan) para responden mengatakan bahwa yang sangat ada peningkatan sebanyak 16,3%, cukup ada peningkatan sebanyak 80,4%, kurang peningkatan sebanyak 3,3% dan sisanya tidak ada peningkatan sebanyak 0,0% dan tidak menjawab

sebanyak 0,0% selengkapnya dapat dilihat pada gambar 5.2. Jadi dapat disimpulkan bahwa memang adanya pertumbuhan ekonomi sudah dirasakan manfaatnya menurut pandangan masyarakat.



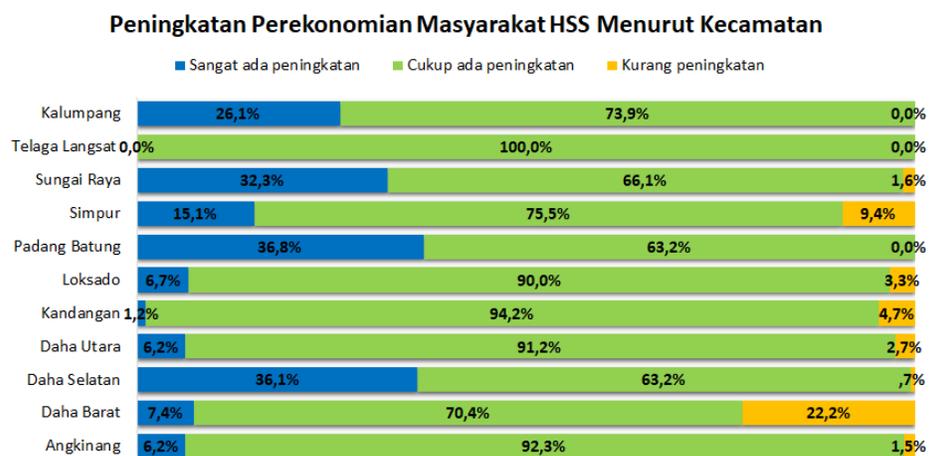
Gambar 5.7 : Grafik Peningkatan Perekonomian Masyarakat HSS

Sumber : Data Primer, 2024

Peningkatan perekonomian masyarakat Hulu Sungai Selatan misalnya daya belanja masyarakat, ramainya orang beraktifitas dibidang ekonomi, perbaikan sandang dan papan/perumahan untuk keseimbangan pendapatan publik (pemerataan) menurut para responden per kecamatan yang menyatakan bahwa sangat ada peningkatan yang terbanyak adalah di Kecamatan Padang Batung sebanyak 36,8%, kemudian Kecamatan Daha Selatan sebanyak 36,1%, Kecamatan Sungai Raya sebanyak 32,3% dan yang terkecil adalah Kecamatan Kandangan sebanyak 1,2%. Kemudian yang cukup ada peningkatan yang terbanyak di Kecamatan Telaga Langsung sebanyak 100%, kemudian Kecamatan Kandangan sebanyak 94,2%, Kecamatan Angkinang sebanyak 92,3% dan yang terkecil adalah Kecamatan Padang Batung sebanyak 63,2%.

Selanjutnya menyatakan kurang peningkatan yang terbanyak pada Kecamatan Daha Barat sebanyak 22,2%, Kecamatan Simpur sebanyak 9,4% dan yang terkecil adalah Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Telaga Langsung masing-masing 0% (lihat grafik 5.3).

Secara umum memang adanya pertumbuhan ekonomi sudah dirasakan manfaatnya menurut pandangan masyarakat. Tetapi ada masyarakat yang masih belum banyak merasakan seperti di Kecamatan Daha Barat bahwa adanya pertumbuhan ekonomi belum banyak dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Daha Barat. Keadaan sangat perlu mendapat perhatian agar pembangunan ekonomi diharapkan lebih bisa semakin berkeadilan dan meratakan pendapatan masyarakat. Karena yang mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi itu adalah bersumber dari DAU maka diharapkan pembangunan di Kecamatan Daha Barat untuk tahun anggaran mendatang perlu lebih diperhatikan.

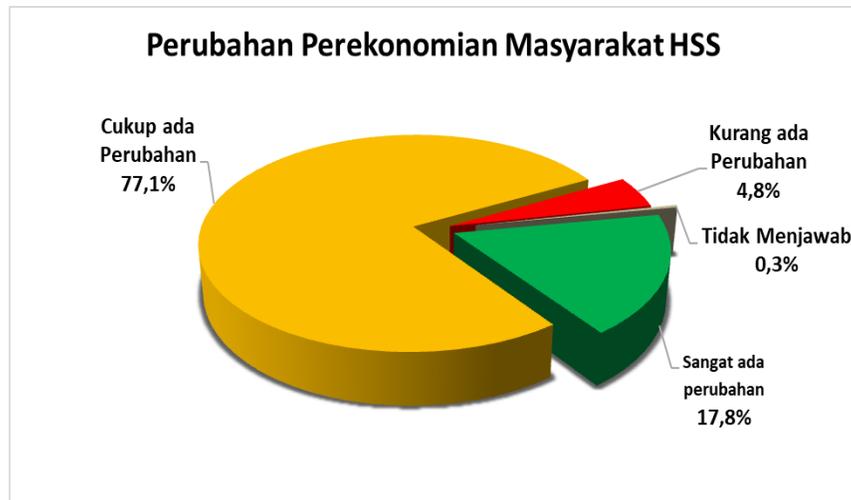


Gambar 5.8 : Grafik Peningkatan Perekonomian Masyarakat HSS Menurut Kecamatan

Sumber : Data Primer, 2024

2) Perubahan Struktur Perekonomian

Perubahan perekonomian masyarakat Hulu Sungai Selatan dari sektor pertanian menuju pada sektor perdagangan, pengolahan dan jasa (industri) para responden mengatakan bahwa yang sangat ada perubahan sebanyak 17,8%, cukup ada perubahan sebanyak 77,1%, kurang perubahan sebanyak 4,8% dan sisanya tidak ada perubahan sebanyak 0,0% dan tidak menjawab sebanyak 0,3% selengkapnya dapat dilihat pada gambar 5.4. Jadi dapat disimpulkan bahwa memang adanya pertumbuhan ekonomi sudah dirasakan adanya perubahan struktur ekonomi daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang sebelumnya hanya bertani 100,0% sekarang sudah berubah dengan menambah usaha lainnya seperti ada yang berdagang, ada yang mengelola industri (khususnya industri mikro dan kecil) dan kesektor- sektor lainnya.



Gambar 5.9 : Grafik Perubahan Perekonomian Masyarakat HSS

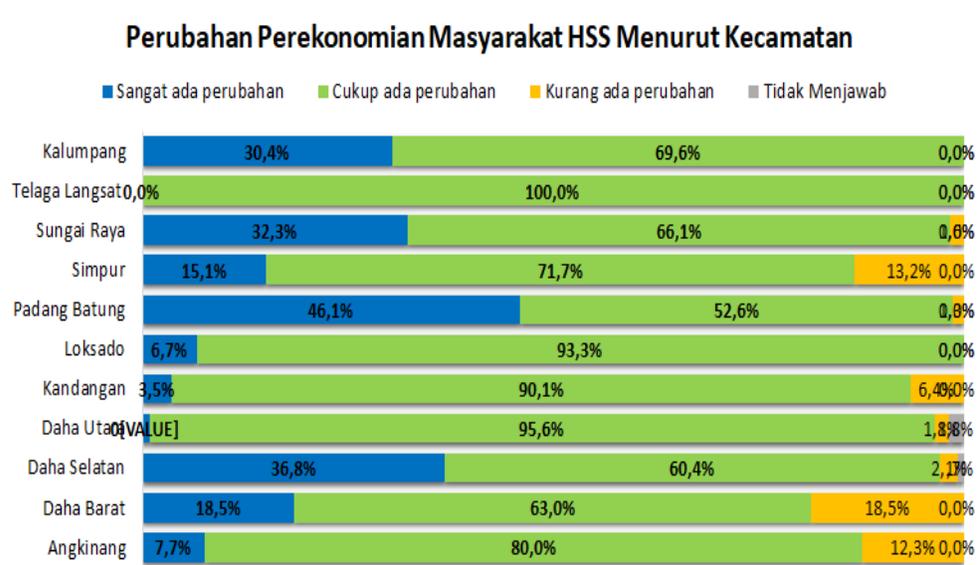
Sumber : Data Primer, 2024

Perubahan perekonomian masyarakat Hulu Sungai Selatan dari sektor pertanian menuju pada sektor perdagangan, pengolahan dan jasa

(industri) menurut para responden per kecamatan yang menyatakan bahwa sangat ada peningkatan yang terbanyak adalah di Kecamatan Padang Batung sebanyak 46,1%, kemudian Kecamatan Daha Selatan sebanyak 36,8%, Kecamatan Sungai Raya sebanyak 32,3% dan yang terkecil adalah Kecamatan Telaga Langsat sebanyak 0,0%. Kemudian yang cukup ada peningkatan yang terbanyak di Kecamatan Telaga Langsat sebanyak 100%, kemudian Kecamatan Daha Utara sebanyak 95,6%, Kecamatan Loksado sebanyak 93,3% dan yang terkecil adalah Kecamatan Padang Batung sebanyak 52,6%. Selanjutnya menyatakan kurang peningkatan yang terbanyak pada Kecamatan Daha Barat sebanyak 18,5%, Kecamatan Simpur sebanyak 13,2% dan yang terkecil adalah Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Telaga Langsat masing-masing 0% (lihat grafik 5.5).

Secara umum memang adanya perubahan perekonomian masyarakat Hulu Sungai Selatan dari sektor pertanian menuju pada sektor perdagangan, pengolahan dan jasa (industri) menurut pandangan masyarakat di beberapa kecamatan. Tetapi ada masyarakat yang masih belum banyak merasakan perubahan seperti di Kecamatan Daha Barat bahwa adanya pertumbuhan ekonomi belum banyak dapat merubah struktur ekonomi masyarakat yang petani ke sektor lainnya di Kecamatan Daha Barat. Keadaan ini sangat perlu mendapat perhatian agar pembangunan ekonomi khususnya dibasis- basis pertanian tidak mesti harus dirubah, tetapi yang perlu adalah adanya peningkatan pembangunan sektor pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan agar lebih banyak meningkatkan nilai tambahnya bagi

masyarakat. Kemudian jika dijual ke pasar sebaiknya sebagian diolah dulu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, jika ini dilakukan maka sektor ekonomi lainnya (industri rumah tangga dan perdagangan) akan tumbuh kembang semakin baik.



Gambar 5.10 : Grafik Perubahan Perekonomian Masyarakat HSS Menurut Kecamatan

Sumber : Data Primer, 2024

3) Pertumbuhan kesempatan kerja

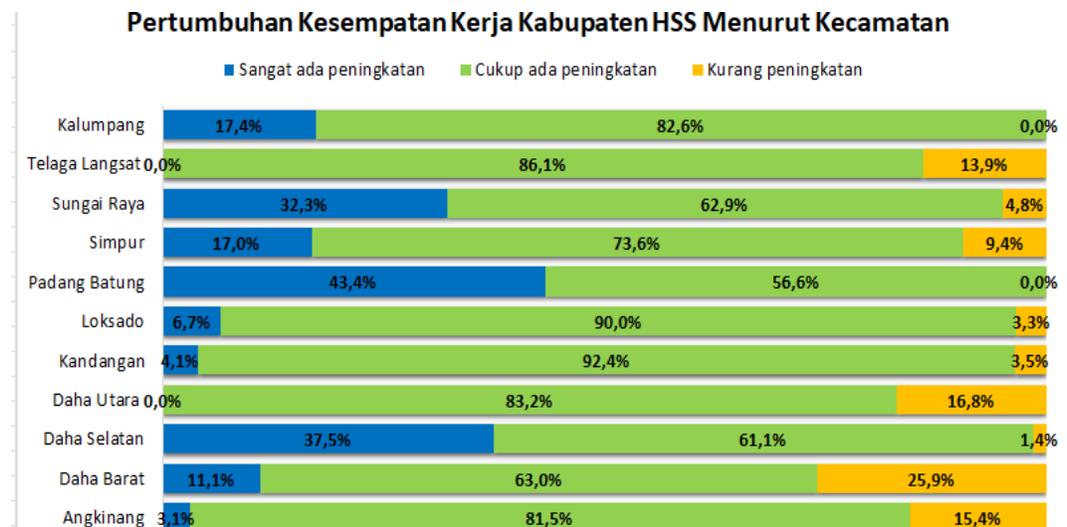
Pertumbuhan kesempatan kerja di Hulu Sungai Selatan para responden mengatakan bahwa yang sangat ada peningkatan sebanyak 16,8%, cukup ada peningkatan sebanyak 76,0%, kurang peningkatan sebanyak 7,2% dan sisanya tidak ada peningkatan sebanyak 0,0% dan tidak menjawab sebanyak 0,0% selengkapnya dapat dilihat pada gambar 5.6. Jadi dapat disimpulkan bahwa memang adanya pertumbuhan ekonomi sudah dapat meningkatkan kesempatan kerja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Gambar 5.11 : Grafik Pertumbuhan Kesempatan Kerja Kabupaten HSS
 Sumber : Data Primer, 2024

Pertumbuhan kesempatan kerja di Hulu Sungai Selatan menurut para responden per kecamatan yang menyatakan bahwa sangat ada peningkatan yang terbanyak adalah di Kecamatan Padang Batung sebanyak 43,4%, kemudian Kecamatan Daha Selatan sebanyak 37,5%, Kecamatan Sungai Raya sebanyak 32,3% dan yang terkecil adalah Kecamatan Telaga Langsung dan Daha Utara masing-masing sebanyak 0,0%. Kemudian yang cukup ada peningkatan yang terbanyak di Kecamatan Kandangan sebanyak 92,4%, kemudian Kecamatan Loksado sebanyak 90,0%, Kecamatan Telaga Langsung sebanyak 86,1% dan yang terkecil adalah Kecamatan Padang Batung sebanyak 52,6%. Selanjutnya menyatakan kurang peningkatan yang terbanyak pada Kecamatan Daha Barat sebanyak 25,9%, Kecamatan Daha Utara sebanyak 16,8% dan yang terkecil adalah Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Padang Batung masing-masing 0% (lihat grafik 5.7).

Secara umum memang ada pertumbuhan kesempatan kerja di Hulu Sungai Selatan menurut pandangan masyarakat di beberapa kecamatan. Tetapi ada masyarakat yang masih belum banyak merasakan pertumbuhan kesempatan kerja seperti di Kecamatan Daha Barat, Kecamatan Daha Utara, Kecamatan Angkinang bahwa adanya pertumbuhan ekonomi belum banyak dapat meningkatkan pertumbuhan kesempatan kerja. Keadaan ini sangat perlu mendapat perhatian agar pembangunan ekonomi khususnya yang menjadi unggulan kecamatan yang bersangkutan agar lebih diprioritaskan agar dapat meningkatkan produksinya dan akhirnya bisa meningkatkan kesempatan kerja.



Gambar 5.12 : Grafik Pertumbuhan Kesempatan Kerja Kabupaten HSS Menurut Kecamatan

Sumber : Data Primer, 2024

4) Tingkat dan Penyebaran Kemudahan

Peningkatan penyebaran kemudahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah dilakukan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan

hidup (seperti pemenuhan sandang, pangan, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan melakukan ibadah dll) para responden mengatakan bahwa yang sangat ada peningkatan sebanyak 19,9%, cukup ada peningkatan sebanyak 77,5%, kurang peningkatan sebanyak 2,6% dan sisanya tidak ada peningkatan sebanyak 0,0% dan tidak menjawab sebanyak 0,0% selengkapnya dapat dilihat pada gambar 5.8. Jadi dapat disimpulkan bahwa memang adanya pertumbuhan ekonomi sudah dapat meningkatkan penyebaran kemudahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah dilakukan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidup (seperti pemenuhan sandang, pangan, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan melakukan ibadah dll) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



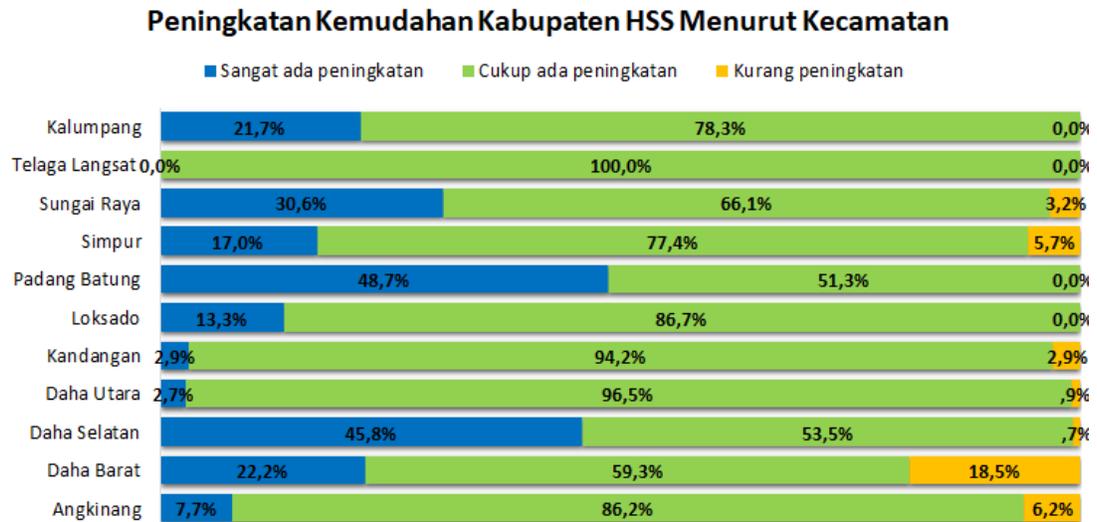
Gambar 5.13 : Grafik Peningkatan Kemudahan Kabupaten HSS
Sumber : Data Primer, 2024

Peningkatan penyebaran kemudahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah dilakukan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidup (seperti pemenuhan sandang, pangan, papan, pelayanan

kesehatan, pendidikan, kesempatan melakukan ibadah dll) menurut para responden per kecamatan yang menyatakan bahwa sangat ada peningkatan yang terbanyak adalah di Kecamatan Padang Batung sebanyak 48,7%, kemudian Kecamatan Daha Selatan sebanyak 45,8%, Kecamatan Sungai Raya sebanyak 30,6% dan yang terkecil adalah Kecamatan Telaga Langsung sebanyak 0,0%. Kemudian yang cukup ada peningkatan yang terbanyak di Kecamatan Telaga Langsung sebanyak 100,0%, kemudian Kecamatan Daha Utara sebanyak 96,5% dan Kecamatan Kandangan sebanyak 94,2% dan yang terkecil adalah Kecamatan Padang Batung sebanyak 51,3%. Selanjutnya menyatakan kurang peningkatan yang terbanyak pada Kecamatan Daha Barat sebanyak 18,5%, Kecamatan Angkinang sebanyak 6,2% dan yang terkecil adalah Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Telaga Langsung masing-masing 0% (grafik 5.9).

Secara umum memang ada peningkatan penyebaran kemudahan yang telah dilakukan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidup (seperti pemenuhan sandang, pangan, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan melakukan ibadah dll) di Hulu Sungai Selatan menurut pandangan masyarakat di beberapa kecamatan. Tetapi ada masyarakat yang masih belum banyak merasakan seperti di Kecamatan Daha Barat, Kecamatan Angkinang dan Kecamatan Simpur bahwa adanya pertumbuhan ekonomi belum banyak dapat meningkatkan penyebaran kemudahan yang telah dilakukan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidup (seperti pemenuhan sandang, pangan, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan melakukan ibadah dll). Keadaan ini sangat perlu mendapat perhatian agar pembangunan

ekonomi dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat Hulu Sungai Selatan secara merata.



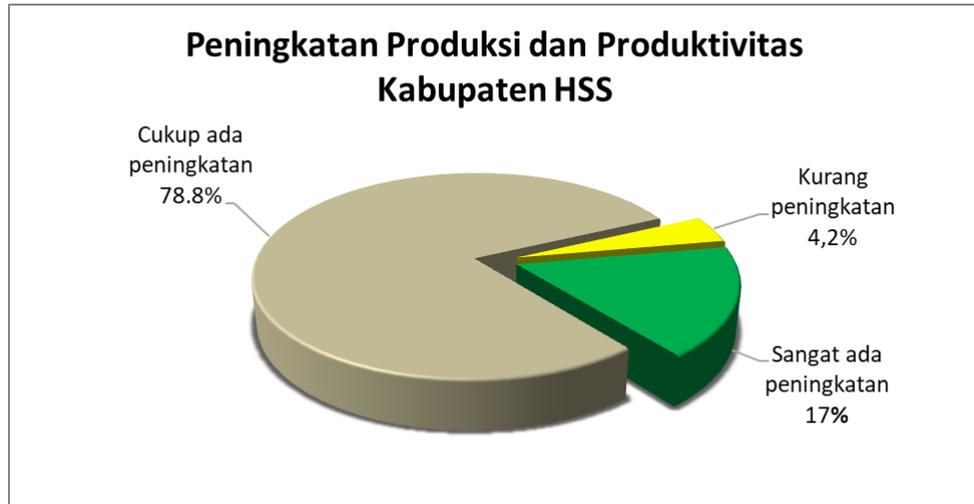
Gambar 5.14 : Grafik Peningkatan Kemudahan Kabupaten HSS Menurut Kecamatan

Sumber : Data Primer, 2024

5) Produk Domestik Regional Bruto

Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan produktivitas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan seperti pertanian, industri pengolahan, pertambangan, komunikasi, jasa hotel, komunikasi dan lain sebagainya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan para responden mengatakan bahwa yang sangat ada peningkatan sebanyak 17,0%, cukup ada peningkatan sebanyak 78,8%, kurang peningkatan sebanyak 4,2% dan sisanya tidak ada peningkatan sebanyak 0,0% dan tidak menjawab sebanyak 0,0% selengkapnya dapat dilihat pada gambar 5.10. Jadi dapat disimpulkan bahwa memang adanya pertumbuhan ekonomi sudah dapat meningkatkan Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto dan produktivitas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan seperti pertanian,

industri pengolahan, pertambangan, komunikasi, jasa hotel, komunikasi dan lain sebagainya. Keadaan ini sangat perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya (khususnya pemerataan pendapatan).



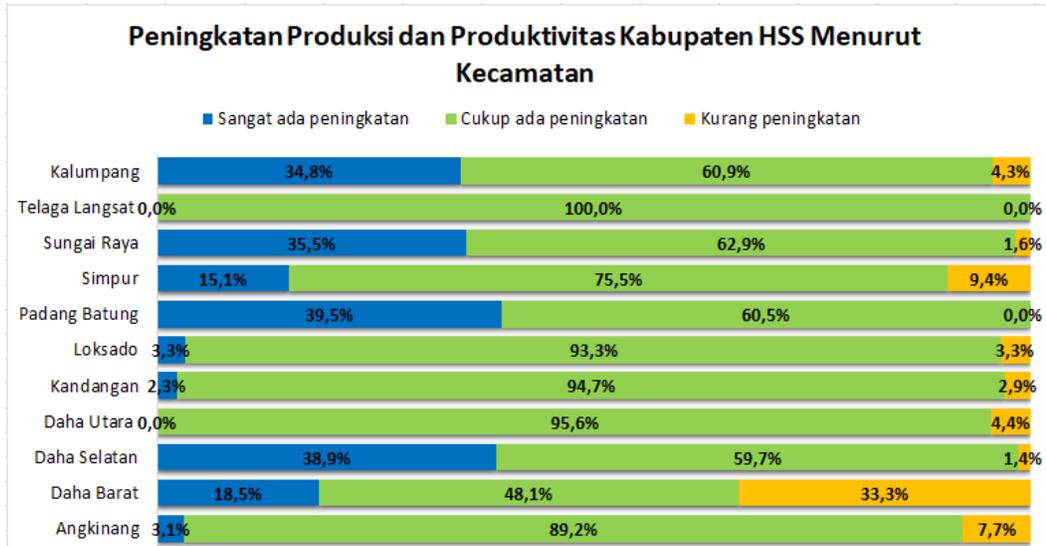
Gambar 5.15 : Grafik PDRB Kabupaten HSS

Sumber : Data Primer, 2024

Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan produktivitas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan seperti pertanian, industri pengolahan, pertambangan, komunikasi, jasa hotel, komunikasi dan lain sebagainya menurut para responden per kecamatan yang menyatakan bahwa sangat ada peningkatan yang terbanyak adalah di Kecamatan Padang Batung sebanyak 39,5%, kemudian Kecamatan Daha Selatan sebanyak 38,9%, Kecamatan Sungai Raya sebanyak 35,5% dan yang terkecil adalah Kecamatan Telaga Langsung dan Kecamatan Daha Utara masing- masing sebanyak 0,0%. Kemudian yang cukup ada peningkatan yang terbanyak di Kecamatan Telaga Langsung sebanyak 100,0%, kemudian Kecamatan Daha Utara sebanyak 95,6% dan Kecamatan Kandangan sebanyak 94,7% dan yang terkecil adalah

Kecamatan Daha Barat sebanyak 48,1%. Selanjutnya menyatakan kurang peningkatan yang terbanyak pada Kecamatan Daha Barat sebanyak 33,3%, Kecamatan Simpur sebanyak 9,4% dan yang terkecil adalah Kecamatan Telaga Langsat dan Kecamatan Padang Batung masing-masing 0,0% (lihat grafik 5.11).

Secara umum memang ada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan produktivitas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan seperti pertanian, industri pengolahan, pertambangan, komunikasi, jasa hotel, komunikasi dan lainya menurut pandangan masyarakat di beberapa kecamatan. Tetapi ada masyarakat yang masih belum banyak merasakan seperti di Kecamatan Daha Barat, Kecamatan Angkinang dan Kecamatan Simpur bahwa adanya pertumbuhan ekonomi belum banyak dapat meningkatkan produksi dan produktivitas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Keadaan ini sangat perlu mendapat perhatian agar pembangunan ekonomi dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat Hulu Sungai Selatan secara merata. Penggunaan DAU untuk membangun ekonomi sangat perlu diperhatikan dan dialokasikan pada Kecamatan Daha Barat, Kecamatan Angkinang dan Kecamatan Simpur sebab 3(tiga) kecamatan ini yang paling banyak mengatakan kurang peningkatan produksi dan produktivitas di kecamatannya.

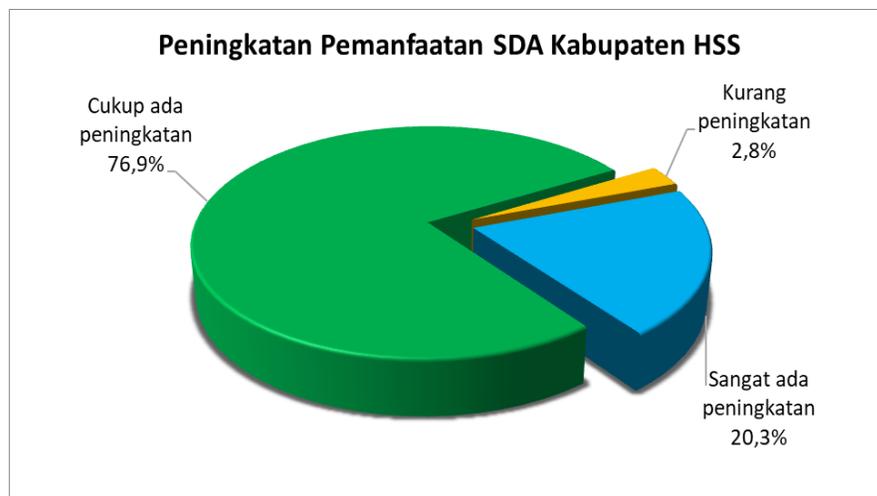


Gambar 5.16 : Grafik PDRB Kabupaten HSS Menurut Kecamatan

Sumber : Data Primer, 2024

6) Sumber Daya alam

Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam yang telah dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (misalnya pemanfaatan potensi SDA menjadi pariwisata dll) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan para responden mengatakan bahwa yang sangat ada peningkatan sebanyak 20,3%, cukup ada peningkatan sebanyak 76,9%, kurang peningkatan sebanyak 2,8% dan sisanya tidak ada peningkatan sebanyak 0,0% dan tidak menjawab sebanyak 0,0% selengkapny dapat dilihat pada gambar 5.12. Jadi dapat disimpulkan bahwa memang adanya pertumbuhan ekonomi sudah dapat meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam yang telah dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (misalnya pemanfaatan potensi SDA menjadi pariwisata dll). Keadaan ini sangat perlu adalah menjaga kelestarian alam untuk pembangunan yang berkelanjutan.

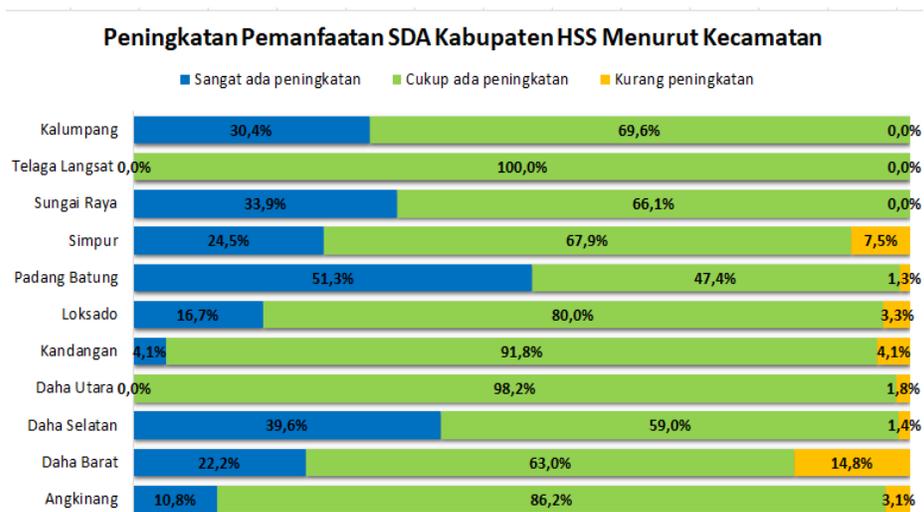


Gambar 5.17 : Grafik Peningkatan Pemanfaatan SDA Kabupaten HSS

Sumber : Data Primer, 2024

Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam yang telah dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (misalnya pemanfaatan potensi SDA menjadi pariwisata dll) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menurut para responden per kecamatan yang menyatakan bahwa sangat ada peningkatan yang terbanyak adalah di Kecamatan Padang Batung sebanyak 51,3%, kemudian Kecamatan Daha Selatan sebanyak 39,6%, Kecamatan Sungai Raya sebanyak 33,9% dan yang terkecil adalah Kecamatan Telaga Langsung dan Kecamatan Daha Utara masing- masing sebanyak 0,0%. Kemudian yang cukup ada peningkatan yang terbanyak di Kecamatan Telaga Langsung sebanyak 100,0%, kemudian Kecamatan Daha Utara sebanyak 98,2% dan Kecamatan Kandangan sebanyak 91,8% dan yang terkecil adalah Kecamatan Padang Batung sebanyak 47,4%. Selanjutnya menyatakan kurang peningkatan yang terbanyak pada Kecamatan Daha Barat sebanyak 14,8%, Kecamatan Simpur sebanyak 7,5% dan yang terkecil adalah Kecamatan Kalumpang Kecamatan Telaga Langsung dan Kecamatan Sungai Raya masing-masing 0,0% (lihat grafik 5.13).

Secara umum ada peningkatan pemanfaatan sumber daya alam yang telah dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (misalnya pemanfaatan potensi SDA menjadi pariwisata dll) menurut pandangan masyarakat di beberapa kecamatan. Tetapi ada masyarakat yang masih belum banyak merasakan seperti di Kecamatan Daha Barat, Kecamatan Telaga Langsung dan Kecamatan Simpur bahwa adanya pertumbuhan ekonomi belum banyak peningkatan pemanfaatan sumber daya alam yang telah dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (misalnya pemanfaatan potensi SDA menjadi pariwisata dll). Keadaan ini sangat perlu mendapat perhatian agar pembangunan ekonomi dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat Hulu Sungai Selatan secara merata. Penggunaan DAU untuk membangun ekonomi sangat perlu diperhatikan dan dialokasikan secara merata pada semua kecamatan.



Gambar 5.18 : Grafik Peningkatan Pemanfaatan SDA Kabupaten HSS Menurut Kecamatan

Sumber : Data Primer, 2024

7) Mutu Pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan masyarakat yang telah dilakukan pemerintah (misalnya jumlah sekolah diperbaiki, beasiswa pendidikan untuk murid dan guru dll) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan para responden mengatakan bahwa yang sangat ada peningkatan sebanyak 18,0%, cukup ada peningkatan sebanyak 79,4%, kurang peningkatan sebanyak 2,6% dan sisanya tidak ada peningkatan sebanyak 0,0% dan tidak menjawab sebanyak 0,0% (gambar 5.14). Jadi dapat disimpulkan bahwa memang adanya pertumbuhan ekonomi sudah dapat meningkatkan mutu pendidikan masyarakat yang telah dilakukan pemerintah. Keadaan ini sangat perlu ditingkatkan untuk pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berkelanjutan.

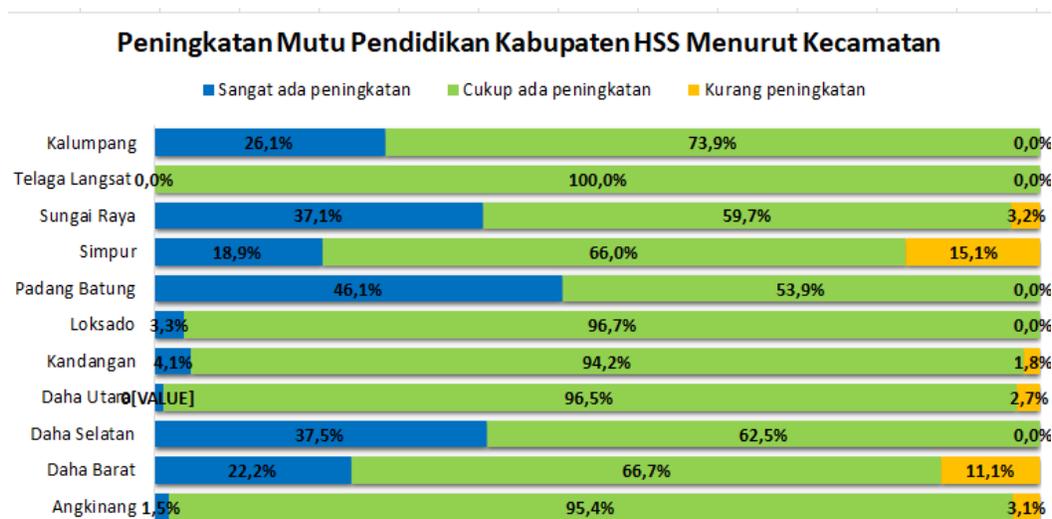


Gambar 5.19 : Grafik Peningkatan Mutu Pendidikan Kabupaten HSS
Sumber : Data Primer, 2024

Peningkatan mutu pendidikan masyarakat yang telah dilakukan pemerintah (misalnya jumlah sekolah diperbaiki, beasiswa pendidikan untuk murid dan guru dll) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menurut

para responden per kecamatan yang menyatakan bahwa sangat ada peningkatan yang terbanyak adalah di Kecamatan Padang Batung sebanyak 46,1%, kemudian Kecamatan Daha Selatan sebanyak 37,5%, Kecamatan Sungai Raya sebanyak 37,1% dan yang terkecil adalah Kecamatan Telaga Langsung sebanyak 0,0%. Kemudian yang cukup ada peningkatan yang terbanyak di Kecamatan Telaga Langsung sebanyak 100,0%, kemudian Kecamatan Loksado sebanyak 96,7% dan Kecamatan Daha Utara sebanyak 96,5% dan yang terkecil adalah Kecamatan Padang Batung sebanyak 53,9%. Selanjutnya menyatakan kurang peningkatan yang terbanyak pada Kecamatan Simpur sebanyak 15,1% Kecamatan Daha Barat sebanyak 11,1%, dan Kecamatan Sungai Raya 3,2% (lihat grafik 5.15).

Secara umum ada peningkatan mutu pendidikan masyarakat yang telah dilakukan pemerintah menurut pandangan masyarakat di beberapa kecamatan. Tetapi ada masyarakat yang masih belum banyak merasakan seperti di Kecamatan Daha Barat, Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Simpur bahwa adanya pertumbuhan ekonomi belum banyak peningkatan mutu pendidikan. Keadaan ini sangat perlu mendapat perhatian agar pembangunan ekonomi dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat Hulu Sungai Selatan secara merata. Penggunaan DAU untuk membangun ekonomi sangat perlu diperhatikan dan dialokasikan secara merata pada semua kecamatan.



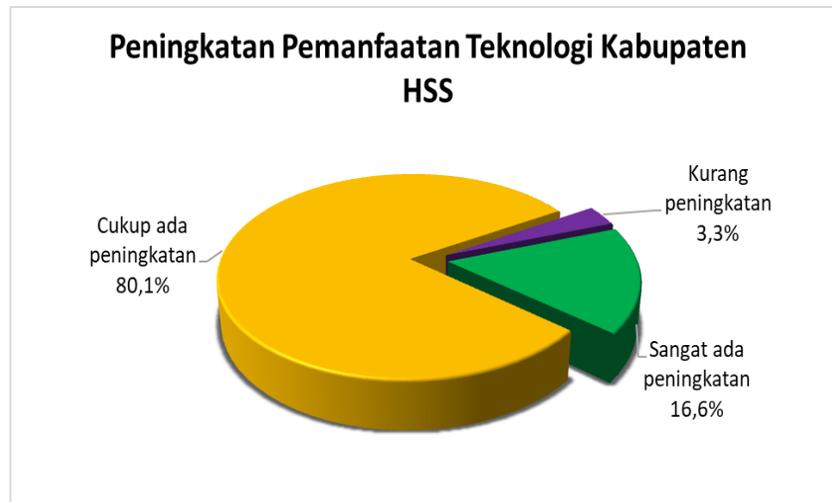
Gambar 5.20 : Grafik Peningkatan Mutu Pendidikan Kabupaten HSS Menurut Kecamatan

Sumber : Data Primer, 2024

8) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah dilakukan pemerintah (misalnya jaringan internet sampai desa, layanan publik digital, kemudahan komunikasi dan lain sebagainya) menurut para responden mengatakan bahwa yang sangat ada peningkatan sebanyak 16,6%, cukup ada peningkatan sebanyak 80,1%, kurang peningkatan sebanyak 3,3% dan sisanya tidak ada peningkatan sebanyak 0,0% dan tidak menjawab sebanyak 0,0% (gambar 5.16). Jadi dapat disimpulkan bahwa memang adanya pertumbuhan ekonomi sudah dapat meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah dilakukan pemerintah. Keadaan ini sangat perlu ditingkatkan untuk pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena ilmu

pengetahuan dan teknologi sangat diperlukan untuk percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi.



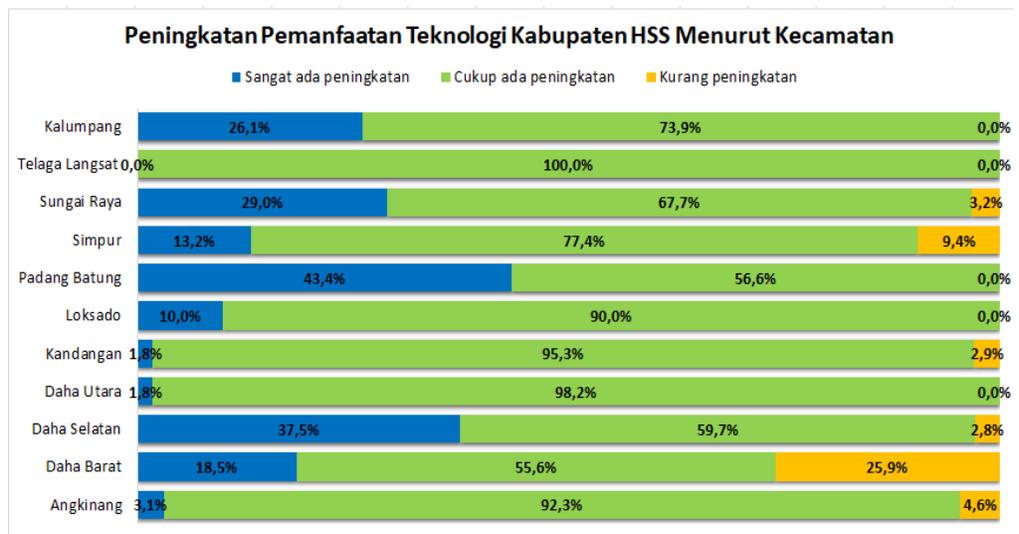
Gambar 5.21 : Grafik Pemanfaatan Teknologi Kabupaten HSS

Sumber : Data Primer, 2024

Peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah dilakukan pemerintah (misalnya jaringan internet sampai desa, layanan publik digital, kemudahan komunikasi dan lain sebagainya) menurut para responden per kecamatan yang menyatakan bahwa sangat ada peningkatan yang terbanyak adalah di Kecamatan Padang Batung sebanyak 43,4%, kemudian Kecamatan Daha Selatan sebanyak 37,5%, Kecamatan Sungai Raya sebanyak 29,0% dan yang terkecil adalah Kecamatan Telaga Langsat sebanyak 0,0%. Kemudian yang cukup ada peningkatan yang terbanyak di Kecamatan Telaga Langsat sebanyak 100,0%, kemudian Kecamatan Daha Utara sebanyak 98,2% dan Kecamatan Kandungan sebanyak 95,3% dan yang terkecil adalah Kecamatan Daha Barat sebanyak 55,6%. Selanjutnya menyatakan kurang peningkatan yang terbanyak pada

Kecamatan Daha Barat sebanyak 25,9% Kecamatan Simpur sebanyak 9,4%, dan Kecamatan Angkinang 4,6% (lihat grafik 5.17).

Secara umum ada peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menurut pandangan masyarakat di beberapa kecamatan. Tetapi ada masyarakat yang masih belum banyak merasakan seperti di Kecamatan Daha Barat, Kecamatan Angkinang dan Kecamatan Simpur bahwa adanya pertumbuhan ekonomi belum banyak peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keadaan ini sangat perlu mendapat perhatian agar pembangunan ekonomi dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat Hulu Sungai Selatan secara merata. Penggunaan DAU untuk membangun ekonomi sangat perlu diperhatikan dan dialokasikan secara merata pada semua kecamatan.

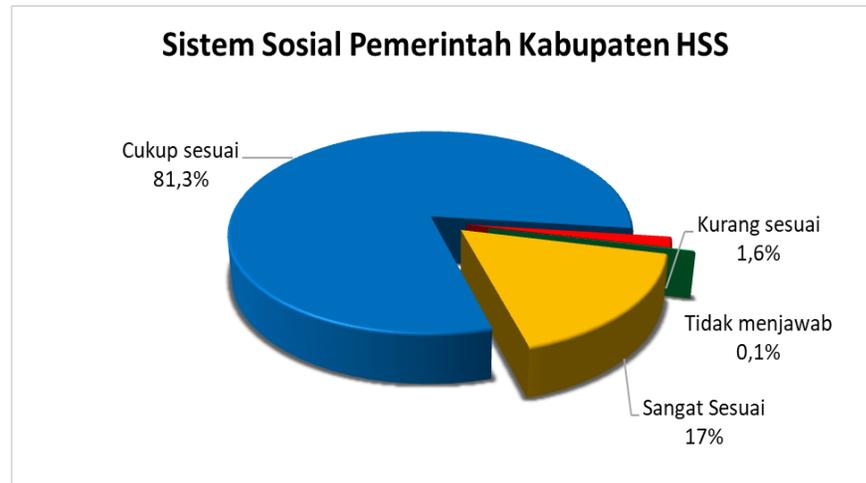


Gambar 5.22 : Grafik Pemanfaatan Teknologi Kabupaten HSS Menurut Kecamatan

Sumber : Data Primer, 2024

9) Sistem Sosial

Peningkatan sistem sosial yang dibangun Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat dalam mewujudkan solidaritas sosial (misalnya pemeliharaan adat dan budaya, pembinaan komunitas dan lain sebagainya) menurut para responden mengatakan bahwa yang sangat sesuai sebanyak 17,0%, cukup sesuai sebanyak 81,3%, kurang sesuai sebanyak 1,6% dan sisanya tidak sesuai sebanyak 0,0% dan tidak menjawab sebanyak 0,1% (gambar 5.18). Jadi dapat disimpulkan bahwa memang adanya pertumbuhan ekonomi sudah dapat meningkatkan sistem sosial yang dibangun Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat dalam mewujudkan solidaritas sosial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah dilakukan pemerintah. Keadaan ini sangat perlu ditingkatkan untuk pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena sistem sosial sangat diperlukan untuk percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi agar tidak terjadi gejolak sosial dimasyarakat.

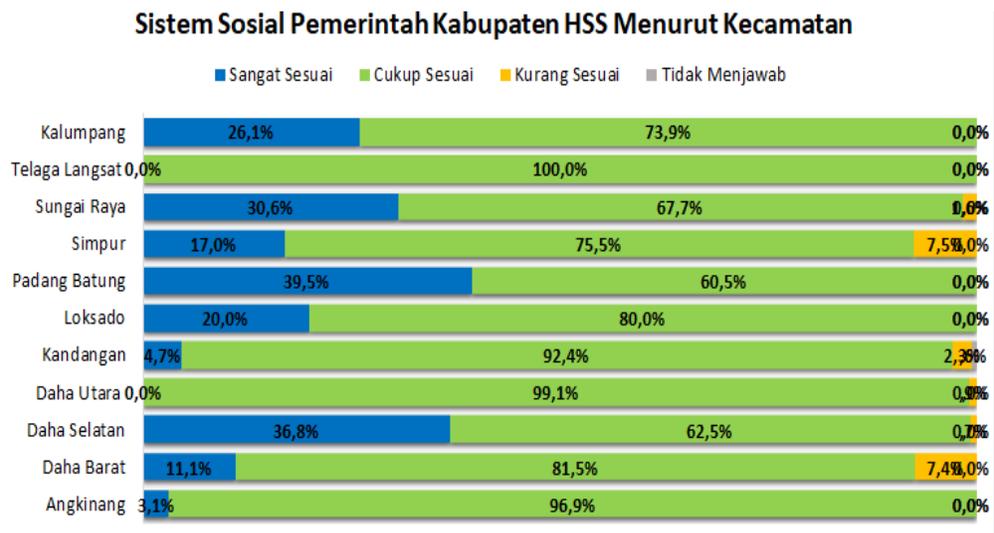


Gambar 5.23 : Grafik Sistem Sosial Pemerintah Kabupaten HSS

Sumber : Data Primer, 2024

Peningkatan sistem sosial yang dibangun Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat dalam mewujudkan solidaritas sosial (misalnya pemeliharaan adat dan budaya, pembinaan komunitas dan lain sebagainya) menurut para responden per kecamatan yang menyatakan bahwa sangat sesuai yang terbanyak adalah di Kecamatan Padang Batung sebanyak 39,5%, kemudian Kecamatan Daha Selatan sebanyak 36,8%, Kecamatan Sungai Raya sebanyak 30,6% dan yang terkecil adalah Kecamatan Telaga Langsung sebanyak 0,0%. Kemudian yang cukup sesuai yang terbanyak di Kecamatan Telaga Langsung sebanyak 100,0%, selanjutnya Kecamatan Daha Utara sebanyak 99,1% dan Kecamatan Angkinang sebanyak 96,9% dan yang terkecil adalah Kecamatan Padang Batung sebanyak 60,5%. Selanjutnya menyatakan kurang sesuai yang terbanyak pada Kecamatan Daha Barat sebanyak 7,4% Kecamatan Simpur sebanyak 7,5%, dan Kecamatan Kandangan 2,3% (lihat grafik 5.19).

Secara umum ada peningkatan sistem sosial yang dibangun Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat dalam mewujudkan solidaritas sosial menurut pandangan masyarakat di beberapa kecamatan. Tetapi ada sedikit masyarakat yang masih belum sesuai seperti di Kecamatan Daha Barat, Kecamatan Simpung dan Kecamatan Simpung. Keadaan ini sangat perlu mendapat perhatian agar pembangunan ekonomi jangan merusak sistem sosial masyarakat, tetapi harus sebaliknya harus dapat meningkatkan sistem sosial yang telah ada dan hidup dimasyarakat.



Gambar 5.24 : Grafik Sistem Sosial Pemerintah Kabupaten HSS Menurut Kecamatan

Sumber : Data Primer, 2024

10) Pasar

Peningkatan aksesibilitas pasar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang disediakan oleh Pemerintah untuk kemudahan masyarakat (semisal perbaikan pasar, pemasaran hasil pertanian mudah, pengembangan

UMKM, ketahanan Bumdes dan lain sebagainya) menurut para responden mengatakan bahwa yang sangat ada peningkatan sebanyak 17,6%, cukup ada peningkatan sebanyak 78,8%, kurang peningkatan sebanyak 3,6% dan sisanya tidak ada peningkatan sebanyak 0,0% dan tidak menjawab sebanyak 0,0% (gambar 5.20). Jadi dapat disimpulkan bahwa memang adanya pertumbuhan ekonomi sudah dapat meningkatkan aksesibilitas pasar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang disediakan oleh Pemerintah untuk kemudahan masyarakat. Keadaan ini sangat perlu ditingkatkan untuk pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena aksesibilitas pasar sangat diperlukan untuk percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi.



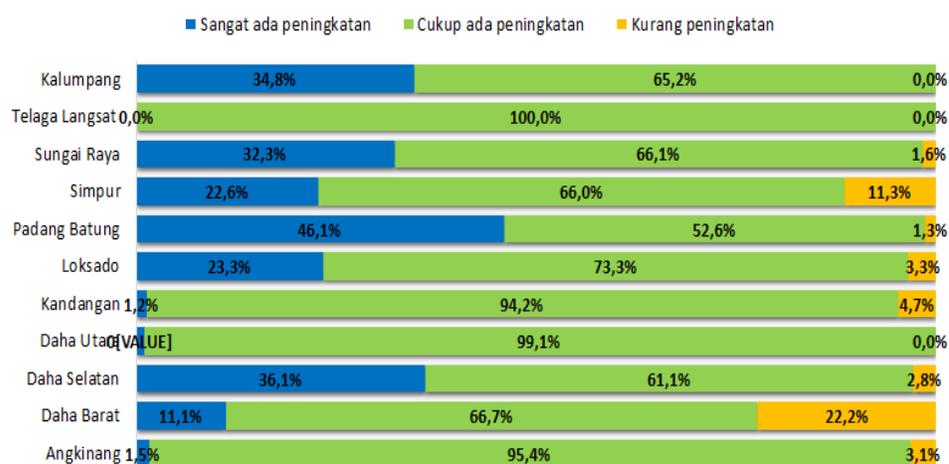
Gambar 5.25 : Grafik Peningkatan Aksesibilitas Pasar Kabupaten HSS
Sumber : Data Primer, 2024

Peningkatan aksesibilitas pasar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang disediakan oleh Pemerintah untuk kemudahan masyarakat (semisal perbaikan pasar, pemasaran hasil pertanian mudah, pengembangan UMKM, ketahanan Bumdes dan lain sebagainya) menurut para

responden per kecamatan yang menyatakan bahwa sangat ada peningkatan yang terbanyak adalah di Kecamatan Padang Batung sebanyak 46,1%, kemudian Kecamatan Daha Selatan sebanyak 36,1%, Kecamatan Kalumpang sebanyak 34,8% dan yang terkecil adalah Kecamatan Telaga Langsung sebanyak 0,0%. Kemudian yang cukup ada peningkatan yang terbanyak di Kecamatan Telaga Langsung sebanyak 100,0%, kemudian Kecamatan Daha Utara sebanyak 99,1% dan Kecamatan Angkinang sebanyak 95,4% dan yang terkecil adalah Kecamatan Padang Batung sebanyak 52,6%. Selanjutnya menyatakan kurang peningkatan yang terbanyak pada Kecamatan Daha Barat sebanyak 22,2% Kecamatan Simpur sebanyak 11,3%, dan Kecamatan Kandangan sebanyak 4,7% (lihat grafik 5.21).

Secara umum ada peningkatan aksesibilitas pasar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menurut pandangan masyarakat di beberapa kecamatan. Tetapi ada masyarakat yang masih belum banyak merasakan seperti di Kecamatan Daha Barat, Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Simpur bahwa adanya pertumbuhan ekonomi belum banyak peningkatan aksesibilitas pasar. Keadaan ini sangat perlu mendapat perhatian agar pembangunan ekonomi dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat Hulu Sungai Selatan secara merata. Penggunaan DAU untuk membangun ekonomi (khususnya pasar) sangat perlu diperhatikan dan dialokasikan secara merata pada semua kecamatan.

Peningkatan Aksesibilitas Pasar Kabupaten HSS Menurut Kecamatan

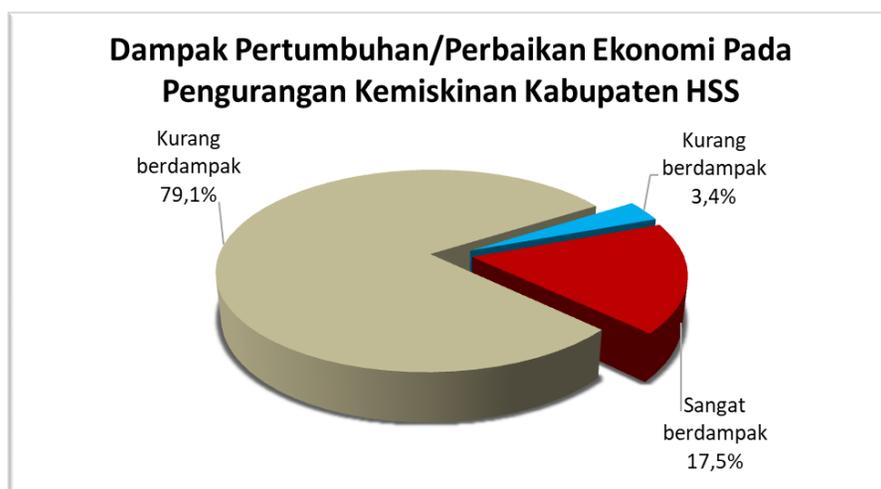


Gambar 5.26 : Grafik Peningkatan Aksesibilitas Pasar Kabupaten HSS Menurut Kecamatan

Sumber : Data Primer, 2024

11) Pengurangan Kemiskinan

Bagaimana pengaruh/dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menurut para responden mengatakan bahwa yang sangat berdampak sebanyak 17,5%, cukup berdampak sebanyak 79,1%, kurang berdampak sebanyak 3,4% dan sisanya tidak ada peningkatan sebanyak 0,0% dan tidak menjawab sebanyak 0,0% (gambar 5.21). Jadi dapat disimpulkan bahwa memang adanya pertumbuhan ekonomi sudah dapat mengurangi kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Keadaan ini sangat perlu ditingkatkan untuk pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena pembangunan daerah khususnya pembangunan ekonomi yang paling utama adalah mengurangi kemiskinan.

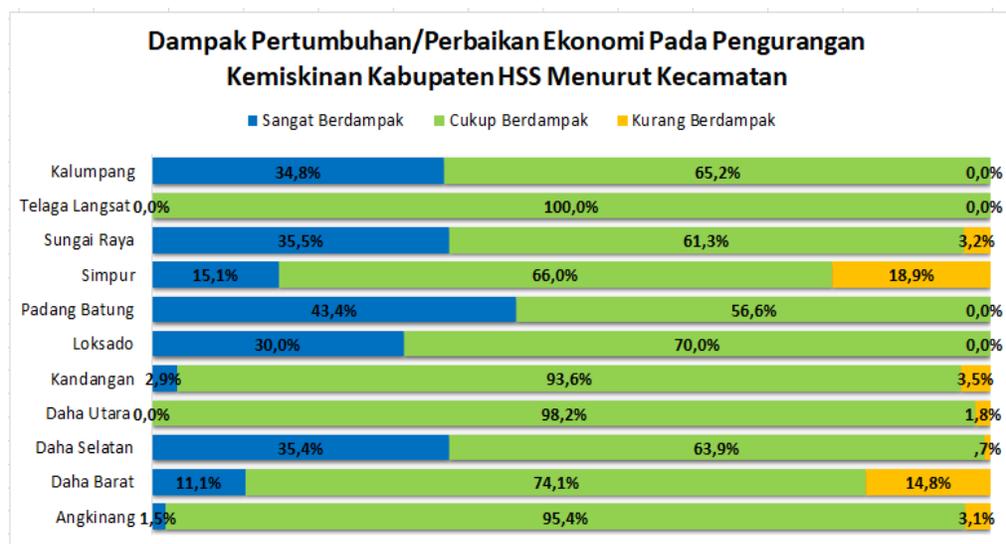


Gambar 5.27 : Grafik Dampak Pertumbuhan/Perbaikan Ekonomi Pada Pengurangan Kemiskinan Kabupaten HSS

Sumber : Data Primer, 2024

Bagaimana pengaruh/dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menurut para responden per kecamatan yang menyatakan bahwa sangat berdampak yang terbanyak adalah di Kecamatan Padang Batung sebanyak 43,4%, kemudian Kecamatan Daha Selatan sebanyak 35,4%, Kecamatan Kalumpang sebanyak 34,8% dan yang terkecil adalah Kecamatan Telaga Langsat sebanyak 0,0%. Kemudian yang cukup berdampak yang terbanyak di Kecamatan Telaga Langsat sebanyak 100,0%, kemudian Kecamatan Daha Utara sebanyak 98,2% dan Kecamatan Angkinang sebanyak 95,4% dan yang terkecil adalah Kecamatan Padang Batung sebanyak 52,6%. Selanjutnya menyatakan kurang berdampak yang terbanyak pada Kecamatan Simpur sebanyak 18,9%, Kecamatan Daha Barat sebanyak 14,8% dan Kecamatan Kandangan sebanyak 3,5% (lihat grafik 5.23).

Secara umum bahwa memang adanya pertumbuhan ekonomi sudah dapat mengurangi kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menurut pandangan masyarakat di beberapa kecamatan. Tetapi ada masyarakat yang masih belum banyak merasakan seperti di Kecamatan Simpur, Kecamatan Daha Barat, dan Kecamatan Kandangan bahwa adanya pertumbuhan ekonomi belum banyak mengurangi kemiskinan. Keadaan ini sangat perlu mendapat perhatian agar pembangunan ekonomi dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat Hulu Sungai Selatan secara merata. Penggunaan DAU untuk membangun ekonomi (khususnya dengan tujuan mengurangi) sangat perlu diperhatikan dan dialokasikan secara merata pada semua kecamatan.

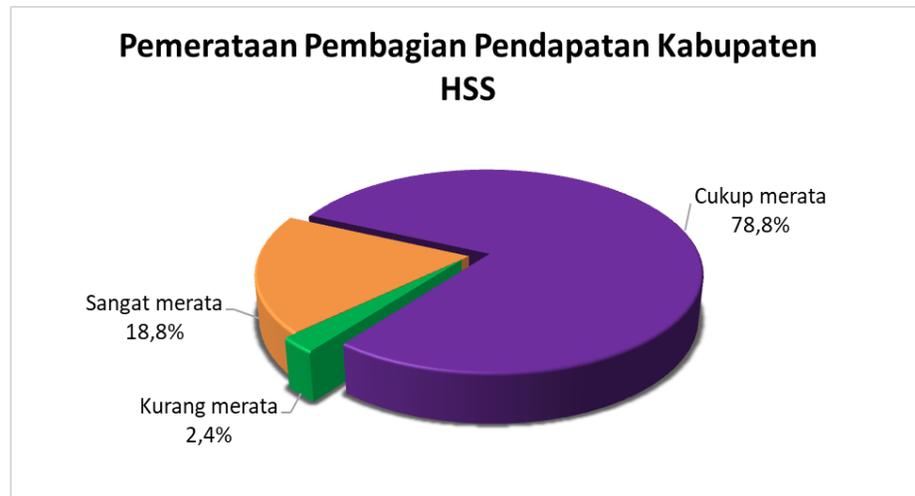


Gambar 5.28 : Grafik Dampak Pertumbuhan/Perbaikan Ekonomi Pada Pengurangan Kemiskinan Kabupaten HSS Menurut Kecamatan

Sumber : Data Primer, 2024

12) Distribusi Pendapatan

Bagaimana pengaruh/dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pemerataan pembagian pendapatan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menurut para responden menurut para responden mengatakan bahwa yang sangat merata sebanyak 18,8%, cukup merata sebanyak 78,8%, kurang merata sebanyak 2,4% dan sisanya tidak ada peningkatan sebanyak 0,0% dan tidak menjawab sebanyak 0,0% (gambar 5.24). Jadi dapat disimpulkan bahwa memang adanya pertumbuhan ekonomi sudah dapat meningkatkan pembagian pendapatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Keadaan ini sangat perlu ditingkatkan untuk pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena pembangunan daerah khususnya pembangunan ekonomi yang paling utama adalah meningkatkan pembagian pendapatan.

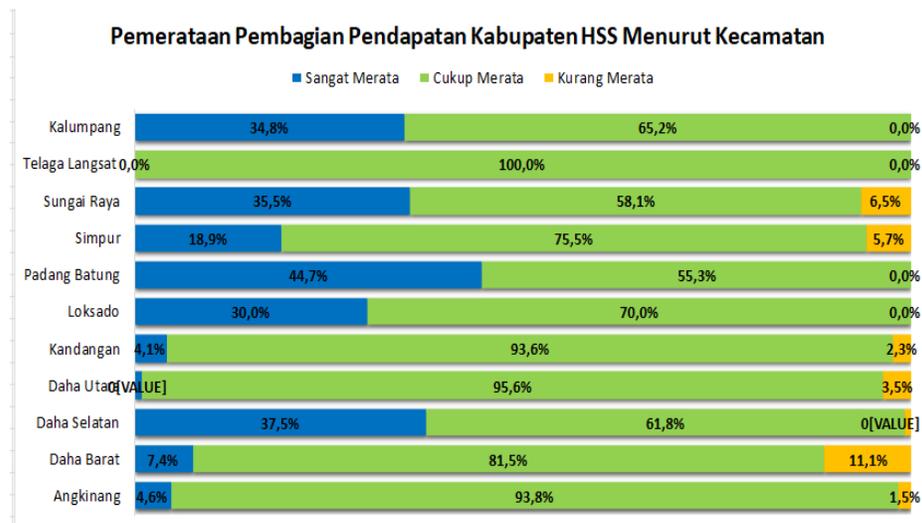


Gambar 5.29 : Grafik Pemerataan Pembagian Pendapatan Kabupaten HSS
Sumber : Data Primer, 2024

Bagaimana pengaruh/dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pemerataan pembagian pendapatan masyarakat di Kabupaten Hulu

Sungai Selatan menurut para responden per kecamatan yang menyatakan bahwa sangat merata yang terbanyak adalah di Kecamatan Padang Batung sebanyak 44,7%, kemudian Kecamatan Daha Selatan sebanyak 37,5%, Kecamatan Kalumpang sebanyak 34,8% dan yang terkecil adalah Kecamatan Telaga Langsat sebanyak 0,0%. Kemudian yang cukup merata yang terbanyak di Kecamatan Telaga Langsat sebanyak 100,0%, kemudian Kecamatan Daha Utara sebanyak 95,6% dan Kecamatan Angkinang sebanyak 93,8% dan yang terkecil adalah Kecamatan Padang Batung sebanyak 55,3%. Selanjutnya menyatakan kurang merata yang terbanyak pada Kecamatan Daha Barat sebanyak 11,1% dan Kecamatan Sungai Raya sebanyak 6,5% dan Kecamatan Simpur sebanyak 5,7% (lihat grafik 5.25).

Secara umum bahwa memang adanya pertumbuhan ekonomi sudah dapat meningkatkan pemerataan pembagian/distribusi pendapatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menurut pandangan masyarakat di beberapa kecamatan. Tetapi ada masyarakat yang masih belum banyak merasakan seperti di Kecamatan Daha Barat, Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Simpur bahwa adanya pertumbuhan ekonomi belum banyak meningkatkan pemerataan pembagian/distribusi pendapatan. Keadaan ini sangat perlu mendapat perhatian agar pembangunan ekonomi dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat Hulu Sungai Selatan secara merata. Penggunaan DAU untuk membangun ekonomi (khususnya dengan tujuan meningkatkan pendapatan) sangat perlu diperhatikan dan dialokasikan secara merata pada semua kecamatan.



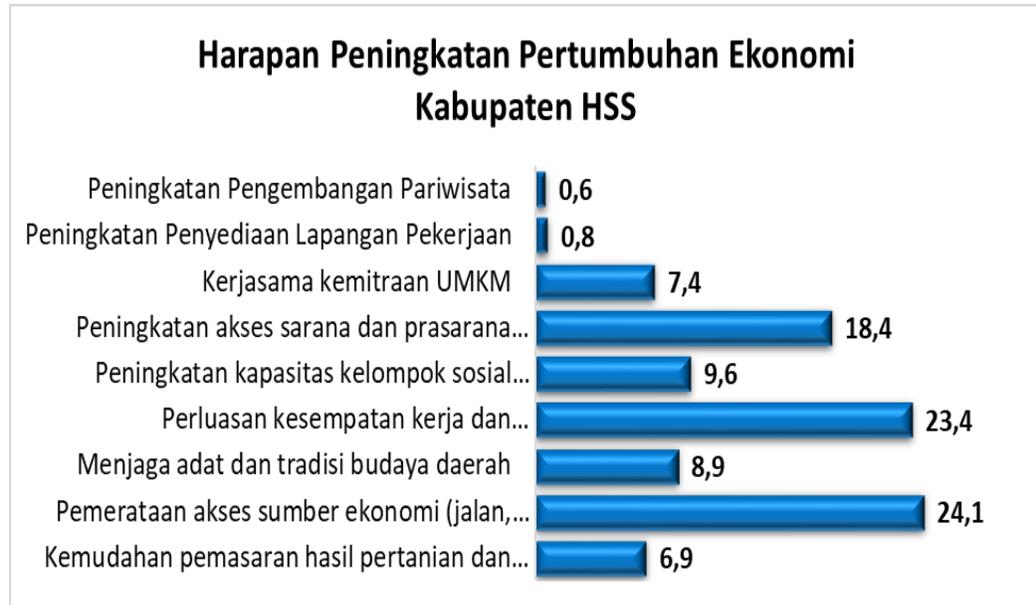
Gambar 5.30 : Grafik Pemerataan Pembagian Pendapatan Kabupaten HSS Menurut Kecamatan

Sumber : Data Primer, 2024

13) Harapan masyarakat untuk peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Harapan- harapan yang diinginkan masyarakat untuk peningkatan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang meliputi: (a). pemerataan akses sumber ekonomi (jalan, jembatan, pasar) sebanyak 24,1%, (b). perluasan kesempatan kerja dan pemanfaatan teknologi sebanyak 23,4%, (c). peningkatan akses sarana dan prasarana pertanian sebanyak 18,4%, (d). peningkatan kapasitas kelompok sosial masyarakat sebanyak 9,6%, (e). menjaga adat dan tradisi budaya daerah sebanyak 8,9%, (f). kerjasama kemitraan UMKM sebanyak 7,4% dan (g). kemudahan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan sebanyak 6,9% (gambar 5.26). Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka sangat perlu diperhatikan harapan/keinginan masyarakat tersebut.

Harapan/keinginan ini merupakan dari hasil riset diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

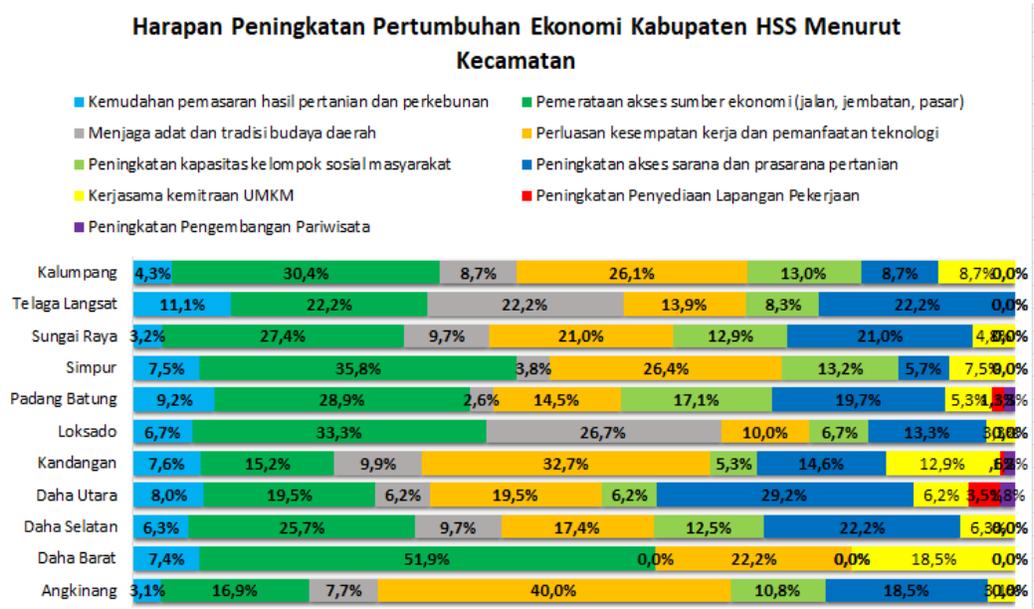


Gambar 5.31 : Grafik Harapan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten HSS

Sumber : Data Primer, 2024

Harapan-harapan yang diinginkan masyarakat untuk peningkatan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menurut para responden per kecamatan yang menyatakan bahwa (a). pemerataan akses sumber ekonomi (jalan, jembatan, pasar) yang terbanyak adalah di Kecamatan Daha Barat sebanyak 51,9%, kemudian Kecamatan Simpur sebanyak 35,8% dan Kecamatan Loksado sebanyak 33,3% (b). perluasan kesempatan kerja dan pemanfaatan teknologi yang terbanyak adalah di Kecamatan Angkinang sebanyak 40,0% kemudian menyusul Kecamatan Kandangan sebanyak 32,7% dan Kecamatan Simpur sebanyak 26,4%, (c). peningkatan akses sarana dan prasarana pertanian yang terbanyak

adalah di Kecamatan Telaga Langsung sebanyak 11,1%, Kecamatan Padang Batung sebanyak 9,2% dan Kecamatan Telaga Langsung sebanyak 8,0% (d). peningkatan kapasitas kelompok sosial masyarakat yang terbanyak adalah Kecamatan Simpur sebanyak 13,2%, kemudian Kecamatan Kalumpang sebanyak 13,0% dan Kecamatan Sungai Raya sebanyak 12,9% (e). menjaga adat dan tradisi budaya daerah yang terbanyak adalah Kecamatan Telaga Langsung sebanyak 22,2%, kemudian Kecamatan Kandangan sebanyak 9,9% dan Kecamatan Sungai Raya sebanyak 9,7% selengkapnya lihat gambar 5.27).



Gambar 5.32 : Grafik Harapan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten HSS Menurut Kecamatan

Sumber : Data Primer, 2024

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

- 1) PAD Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada periode 2004- 2023 (selama 20 tahun) pertumbuhannya mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Rata- rata pertumbuhan per tahun selama 20 tahun terakhir mencapai 18,82%, keadaan ini menunjukkan pertumbuhan yang tinggi
- 2) Penerimaan DAU Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada periode 2004- 2023 (selama 20 tahun) pertumbuhannya mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Rata- rata pertumbuhan per tahun selama 20 tahun terakhir mencapai 7,62%, keadaan ini menunjukan pertumbuhan yang cukup tinggi
- 3) Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada periode 2004- 2023 (selama 20 tahun) pertumbuhannya mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Rata- rata pertumbuhan per tahun selama 20 tahun terakhir mencapai 13,60%, keadaan ini menunjukan pertumbuhan belanja daerah yang tinggi
- 4) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada periode 2004- 2023 (selama 20 tahun) pertumbuhannya mengalami fluktuasi tetapi kelihatannya cukup stabil . Rata- rata pertumbuhan per tahun selama 20 tahun terakhir mencapai 4,79%, keadaan ini menunjukan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

- 5) Hasil analisis regresi linear berganda (a). PAD dan DAU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. (b). PAD tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. (c). DAU berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. (d). Belanja Daerah tidak mampu memoderasi hubungan *independent variable* PAD terhadap *dependent variable* Pertumbuhan Ekonomi. (e). Belanja Daerah tidak mampu memoderasi hubungan *independent variable* DAU terhadap *dependent variable* Pertumbuhan Ekonomi.
- 6) Dalam upaya mengetahui hasil/manfaat dari pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan apakah dirasakan juga oleh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka dilakukan riset Persepsi Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan sampel 800 responden yang tersebar di sebelas kecamatan. Teori digunakan untuk mengetahui manfaat pertumbuhan ekonomi terhadap masyarakat ini menggunakan teori indikator pertumbuhan ekonomi wilayah yang meliputi: (a). Keseimbangan Pendapatan, (b). Perubahan Struktur Perekonomian, (c). Pertumbuhan Kesempatan Kerja, (d). Tingkat dan Penyebaran Kemudahan, (e). Produk Domestik Regional Bruto, (f). Sumber Daya Alam, (g). Mutu Pendidikan, (h). Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (i). Sistem Sosial, dan (j). Pasar.
- 7) Hasilnya adalah:
 - a) Keseimbangan Pendapatan dirasakan manfaatnya menurut pandangan masyarakat, tetapi ada masyarakat yang masih belum

banyak merasakan seperti di Kecamatan Daha Barat dan Kecamatan Simpur

- b) Perubahan Struktur Perekonomian, adanya pertumbuhan ekonomi sudah dirasakan adanya perubahan struktur ekonomi daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang sebelumnya hanya bertani 100,0% sekarang sudah berubah dengan menambah usaha lainnya seperti ada yang berdagang, ada yang mengelola industri (khususnya industri mikro dan kecil) dan kesektor- sektor lainnya. tetapi ada masyarakat yang masih belum banyak merasakan seperti Kecamatan Daha Barat dan Kecamatan Simpur.
- c) Pertumbuhan Kesempatan Kerja, adanya pertumbuhan ekonomi sudah dapat meningkatkan kesempatan kerja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tetapi ada masyarakat yang masih belum banyak merasakan Kecamatan Daha Barat dan Kecamatan Daha Utara.
- d) Tingkat dan Penyebaran Kemudahan, adanya pertumbuhan ekonomi sudah dapat meningkatkan penyebaran kemudahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah dilakukan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidup (seperti pemenuhan sandang, pangan, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan melakukan ibadah dll) tetapi ada masyarakat yang masih belum banyak merasakan Kecamatan Daha Barat dan Kecamatan Angkinang.
- e) Produk Domestik Regional Bruto, adanya pertumbuhan ekonomi sudah dapat meningkatkan Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto dan produktivitas di Kabupaten Hulu Sungai

Selatan tetapi ada masyarakat yang masih belum banyak merasakan Kecamatan Daha Barat dan Kecamatan Simpur.

- f) Sumber Daya Alam, adanya pertumbuhan ekonomi sudah dapat meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam yang telah dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tetapi ada masyarakat yang masih belum banyak merasakan Kecamatan Daha Barat dan Kecamatan Simpur.
- g) Mutu Pendidikan, adanya pertumbuhan ekonomi sudah dapat meningkatkan mutu pendidikan masyarakat yang telah dilakukan pemerintah tetapi ada masyarakat yang masih belum banyak merasakan Kecamatan Daha Barat, Kecamatan Simpur dan Kecamatan Sungai Raya
- h) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, adanya pertumbuhan ekonomi sudah dapat meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tetapi ada masyarakat yang masih belum banyak merasakan Kecamatan Daha Barat, Kecamatan Simpur dan Kecamatan Angkinang.
- i) Sistem Sosial, adanya pertumbuhan ekonomi sudah dapat meningkatkan sistem sosial yang dibangun dan sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat dalam mewujudkan solidaritas sosial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tetapi ada beberapa masyarakat yang menyatakan kurang sesuai seperti di Kecamatan Daha Barat, Kecamatan Simpur dan Kecamatan Kandangan.

- j) Pasar, adanya pertumbuhan ekonomi sudah dapat meningkatkan aksesibilitas pasar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tetapi ada masyarakat yang masih belum banyak merasakan Kecamatan Daha Barat, Kecamatan Simpur dan Kecamatan Kandangan.
- 8) Adanya pertumbuhan ekonomi sudah dapat mengurangi kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tetapi ada masyarakat yang masih belum banyak merasakan Kecamatan Simpur, Kecamatan Simpur Daha Barat dan Kecamatan Kandangan.
- 9) Adanya pertumbuhan ekonomi sudah dapat meningkatkan pembagian pendapatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tetapi ada masyarakat yang masih belum banyak merasakan Kecamatan Simpur, Kecamatan Daha Barat dan Kecamatan Sungai Raya.
- 10) Secara keseluruhan masyarakat yang kurang merasakan dampak positif dari adanya pertumbuhan ekonomi terkonsentrasi terbanyak adalah di Kecamatan Daha Barat. Kemudian yang paling banyak merasakan dampak positifnya adalah masyarakat yang ada di Kecamatan Padang Batung dan Kecamatan Daha Selatan.

6.2. Rekomendasi

- 1) Dalam meningkatkan PAD jangan sampai menyebabkan biaya tinggi bagi masyarakat, supaya tidak menyebabkan daya beli masyarakat turun.
- 2) Hendaknya penggunaan DAU untuk membangun daerah, khususnya dengan tujuan pembangunan ekonomi sangat perlu diperhatikan dan dialokasikan secara merata dan adil pada semua kecamatan.

- 3) Pembangunan sektor unggulan khususnya sektor pertanian dan sektor pariwisata dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam harus terus ditingkatkan sebab sangat membantu ekonomi Masyarakat yang semakin bertumbuh.
- 4) Perbaikan kondisi infrastruktur penunjang perekonomian seperti jalan , jembatan, pasar, fasilitas pelayanan publik dapat terus dilakukan oleh instansi terkait agar semakin memperkuat jaringan sosial Masyarakat.
- 5) Pemanfaatan teknologi berbasis digital sangat penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi terlebih di wilayah yang jauh dari perkotaan sehingga perlu ditambah akses pendukung jaringan internet
- 6) Perluasan akses lapangan pekerjaan perlu terus dilakukan mengingat ada banyak *private sector* yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga penting untuk terus dilakukan kolaborasi antar pihak dalam menunjang pertumbuhan ekonomi
- 7) Kolaborasi antar sektor perlu untuk terus dilakukan dan ditingkatkan demi peningkatan perekonomian Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang semakin membaik
- 8) Sektor pertambangan perlu mendapat pengawasan lebih mengingat kelestarian lingkungan dan sektor pertanian. Perlu ada program-program CSR dari *private sector* di wilayah operasional pertambangan agar menunjang pemberdayaan ekonomi masyarakat kawasan tambang melalui instansi terkait

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2014). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Anggareni, I., Rachman, D., & Karlimat, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Garut Periode 2010-2019. *Ilmiah Akuntansi*, 27-37.
- Asmuruf, M. F., Rimate, V. A., & Kawung, G. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Sorong. *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 727-737.
- Azhar, A. A., & Hermanto, S. B. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-15.
- Budiaman. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik*. Andi Offset.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research and Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. In Thousand Oaks California.
- Devita, A., Delis, A., & Junaidi. (2014, Oktober-Desember). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2, 63-70.
- Felix, O. (2012, February). Analysis of the effectiveness of capital expenditure budgeting in the local government system of Ondo State, Nigeria. *Journal of Accounting and Taxation*, 1-6. doi:10.5897/JAT11.038
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *INOVASI*, 44-52.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariable dengan program IBM SPSS 25 edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Isyandi, B., & Trihatmoko, R. A. (2022). An Analysis of Regional Economic Performanse of Riau on the Capital Expenditure Budget: A Study of Indonesian Territorial Economics. *International Journal of Public Policy and Administration Research*, 33-45.
- KBBI Daring. (2022, Oktober 12). KBBI Daring. Retrieved from kbbi kemendikbud: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Opsen> Kementerian Keuangan. (2022, Oktober 10).
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Retrieved from djpk kemenkue : <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-cara-menghitung-belanja-infrastruktur-yang-bersumber-dari-transfer-ke-daerah-yang-penggunaannya-bersifat-umum>
- Liana, L. (2009). Penggunaan MRA dengan Spss untuk Menguji Pengaruh Variabel Moderating terhadap Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen. *Jurnal Tenologi Informasi DINAMIK*, 90-97.
- Louis, C. (2018). *Research methods in education / Louis Cohen, Lawrence Manion and Keith Morrison*. In *Research methods in education*.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Penerbit BPFE-Yogyakarta
- Osborne, D., & Gaebler, T. (2003). *Mewirausahakan Birokrasi: Reinventing Government Mentransformasi Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik*. In Penerbit PPM.
- Prakosa, K. B. (2004, Desember). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (studi empirik di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY). *JAAI*, 8, 101-118.
- Purba, D. s., Tarigan, W. J., Sinaga, M., & Tarigan, V. (2021). Pelatihan Penggunaan Software SPSS Dalam Pengolahan Regresi Linear Berganda Untuk Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun Di Masa Pandemi Covid 19. *Karya Abdi*, 202-208.

- Rachayu, K. (2019). Efektivitas Otonomi Daerah Dalam Membangun Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pada Masyarakat Pedesaan. *Sosiohumaniora*. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i1.11974>
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono, & Susanto, A. (2017). *Cara Mudah Belajar SPSS & LISREL*. Bandung: ALFABETA.
- Sujarweni, V. W. (2018). *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Sumangkut, E. Y., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2016). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Belanja Daerah Di Kota Bitung. *Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 56-72.
- Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Republik Indonesia 2022, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- _____ 2013, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013.



**PUSAT STUDI KEBIJAKAN PUBLIK
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TAHUN 2024**